# PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
## (Studi Kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**


| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Fitri Andriani** |
| **NIM** | : | **22 2011 345** |


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**2015**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Andriani

NIM : 22 2011 345

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2015

Penulis

**Fitri Andriani**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**Universitas Muhammadiyah**
**Palembang**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| **Judul** | **: Pemahaman dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Badan Pemerintah Kota Palembang)** |
| **Nama** | **: Fitri Andriani** |
| **NIM** | **: 22 2011 345** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi dan Bisnis** |
| **Program Studi** | **: Akuntansi** |
| **Mata Kuliah Pokok** | **: Akuntansi Sektor Publik** |

**Diterima dan Disahkan**
**Pada Tanggal.....**

**Pembimbing,**

**(Betri, S.E., M.Si., Ak., CA.)**
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

**Mengetahui,**
**Dekan**
**Ub. Ketua Program Studi Akuntansi**

**(Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si.)**
**NIDN/NBM: 0228115802/1021961**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan,
kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar,
kita segera akan melihat bentuk aslinya."
(Joseph Addison)

Kecil diantara yang besar dan besar diantara yang kecil
adalah salah
Kecil diantara yang kecil dan besar diantara yang besar
adalah benar

Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah
yang terbaik dari Allah Swt. dan aku percaya Dia akan
selalu memberikan yang terbaik untukku pada
waktu yang telah Ia tetapkan.
(Fitri Andriani)

Terucap syukur Ku Persembahkan kepada:

- Sang pemilik hidup ini, Allah SWT.
- Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
- Ayahanda A. Rani dan Ibunda Aisyah yang tercinta
- Pak Betri yang tak pernah lelah membimbingku, dan terima kasih atas bimbingannya
- Adik-adikku (Zainuri dan Meisi) yang tersayang
- Almamaterku

# PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat islam, iman, kesehatan beserta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pemahaman dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua kandung tercinta Ayahandaku Ahmad Rani dan Ibundaku Aisyah, saudara-saudaraku Ahmad Zainuri Syahril dan Meisi Murni Asih serta seluruh keluarga besar yang senantiasa selalu dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, memberikan inspirasi, motivasi, materi dan dukungan agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri,S.E.,M.Si.Ak.,CA. selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini yang sabar membimbing, memberikan nasehat dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA. Selaku Pembimbing Skripsi, terima kasih atas seluruh pemikiran, tenaga, waktu, masukan, dan kritik kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu guna mencerdaskan anak didiknya sehingga terbentuknya mahasiswa yang unggul dan islami.
7. Pimpinan beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahandaku Ahmad Rani dan Ibundaku Aisyah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama menjalankan kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Adik-adikku tercinta (Ananda A. Zainuri Syahril dan Adinda Meisi Murni Asih) yang selalu memberikan semangat dan dukungan atas semua kegiatanku.
10. Untuk seseorang yang nanti akan menjadi pendamping hidupku, buatlah hidupku lebih berwarna dan berarti.
11. Teman seperjuangan menyelesaikan skripsi ini (Irma Oktaliza)

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Penulis juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Penulis tidak dapat menggantikan kebaikan semua kecuali rasa terima kasih. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Palembang, Agustus 2015
Penulis,

**Fitri Andriani**

## DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN DEPAN ..... i

HALAMAN JUDUL ..... ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... v

PRAKATA ..... vi

HALAMAN DAFTAR ISI ..... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... xiii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... xv

HALAMAN DAFTAR DIAGRAM ..... xvi

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... xviii

ABSTRAK ..... xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Manfaat Penelitian ..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya ..... 10

B. Landasan Teori ..... 15

1. Konsep Pemahaman ..... 15
2. Konsep Kesiapan..... 16
3. Standar Akuntansi Pemerintahan..... 17
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan..... 17
b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan..... 18
4. Akuntansi Berbasis Akrual..... 19
a. Pengertian Basis Akrual..... 19
b. Kelebihan dan Kelemanhan Basis Akrual ..... 20
5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual..... 22
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual..... 22
b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual..... 24
6. Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan ..... 25
7. Kendala Akuntansi Berbasis Akrual ..... 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 30
B. Lokasi Penelitian..... 31
C. Operasionalisasi Variabel ..... 31
D. Populasi..... 32
E. Data yang Diperlukan ..... 33
F. Metode Pengumpulan Data ..... 34

G. Analisis Data dan Teknik Analisis ..... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ..... 36

1. Profil Badan Pemerintahan Daerah Kota Palembang. 36

a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP) Kota Palembang..... 36

b. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kota Palembang ..... 37

c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kota Palembang ..... 38

d. Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang ..... 38

e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang ..... 39

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan KESBANGPOL) Kota Palembang..... 40

g. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang .....41

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Palembang ..... 42

i. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (BARPUSDOK) Kota Palembang..... 43

2. Struktur Organisasi..... 44

3. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 45

B. Pembahasan ..... 48

1. Gambaran Karakteristik Responden ..... 48

2. Rekapitulasi Jawaban Responden ..... 50

3. Pembahasan ..... 53

a. Variabel Pemahaman Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual ..... 53

b. Variabel Kesiapan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual ..... 58

1) Indikator Komitmen ..... 58

2) Indikator Sumber Daya Manusia ..... 67

3) Indikator Sarana dan Prasarana ..... 78

4) Indikator Sistem Informasi ..... 87

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ..... 95

B. Saran ..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel I.1 Hasil Survei Pendahuluan ..... 6

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan ..... 13

Tabel II.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual Secara Bertahap ..... 25

Tabel III.1 Daftar Lokasi Penelitian ..... 31

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel ..... 32

Tabel III.3 Daftar Jumlah Populasi ..... 33

Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 50

Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..... 50

Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .... 51

Tabel IV.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Pemahaman ..... 52

Tabel IV.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Komitmen ..... 52

Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel SDM ..... 53

Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sarana Prasarana ... 53

Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Informasi ... 54

Tabel IV.9 Pemahaman atas Pernyataan Nomor 1 ..... 54

Tabel IV.10 Pemahaman atas Pernyataan Nomor 2 ..... 57

Tabel IV.11 Kesiapan Indikator Komitmen atas Pernyataan Nomor 1 ..... 59

Tabel IV.12 Kesiapan Indikator Komitmen atas Pernyataan Nomor 2 ..... 60

Tabel IV.13 Kesiapan Indikator Komitmen atas Pernyataan Nomor 3 ..... 62

Tabel IV.14 Kesiapan Indikator Komitmen atas Pernyataan Nomor 4 ..... 64

Tabel IV.15 Kesiapan Indikator Komitmen atas Pernyataan Nomor 5 ..... 66

Tabel IV.16 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 1 ..... 68

Tabel IV.17 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 2 ..... 69

Tabel IV.18 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 3 ..... 71

Tabel IV.19 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 4 ..... 72

Tabel IV.20 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 5 ..... 74

Tabel IV.21 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 6 ..... 75

Tabel IV.22 Kesiapan Indikator SDM atas Pernyataan Nomor 7 ..... 77

Tabel IV.23 Kesiapan Indikator Sarana Prasarana atas Pernyataan No. 1.... 79

Tabel IV.24 Kesiapan Indikator Sarana Prasarana atas Pernyataan No. 2.... 81

Tabel IV.25 Kesiapan Indikator Sarana Prasarana atas Pernyataan No. 3.... 83

Tabel IV.26 Kesiapan Indikator Sarana Prasarana atas Pernyataan No. 4.... 85

Tabel IV.27 Kesiapan Indikator Sarana Prasarana atas Pernyataan No. 5.... 86

Tabel IV.28 Kesiapan Indikator Sistem Informasi atas Pernyataan No. 1.... 88

Tabel IV.29 Kesiapan Indikator Sistem Informasi atas Pernyataan No. 2.... 90

Tabel IV.30 Kesiapan Indikator Sistem Informasi atas Pernyataan No. 3.... 91

Tabel IV.31 Kesiapan Indikator Sistem Informasi atas Pernyataan No. 4.... 93

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang ..... 45

## DAFTAR DIAGRAM

Halaman


Diagram IV.1 Diagram Pemahaman atas Pernyataan Nomor 1 ..... 55

Diagram IV.2 Diagram Pemahaman atas Pernyataan Nomor 2 ..... 57

Diagram IV.3 Diagram Kesiapan Komitmen atas Pernyataan Nomor 1..... 59

Diagram IV.4 Diagram Kesiapan Komitmen atas Pernyataan Nomor 2..... 61

Diagram IV.5 Diagram Kesiapan Komitmen atas Pernyataan Nomor 3..... 63

Diagram IV.6 Diagram Kesiapan Komitmen atas Pernyataan Nomor 4..... 65

Diagram IV.7 Diagram Kesiapan Komitmen atas Pernyataan Nomor 5..... 66

Diagram IV.8 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 1 ..... 68

Diagram IV.9 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 2 ..... 70

Diagram IV.10 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 3 ..... 71

Diagram IV.11 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 4 ..... 73

Diagram IV.12 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 5 ..... 74

Diagram IV.13 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 6 ..... 76

Diagram IV.14 Diagram Kesiapan SDM atas Pernyataan Nomor 7 ..... 77

Diagram IV.15 Diagram Kesiapan Sarana dan Prasarana atas Pernyataan Nomor 1 ..... 80

Diagram IV.16 Diagram Kesiapan Sarana dan Prasarana atas Pernyataan Nomor 2 ..... 81

Diagram IV.17 Diagram Kesiapan Sarana dan Prasarana atas Pernyataan Nomor 3 ..... 83

Diagram IV.18 Diagram Kesiapan Sarana dan Prasarana atas Pernyataan Nomor 4 ..... 85
Diagram IV.19 Diagram Kesiapan Sarana dan Prasarana atas Pernyataan Nomor 5 ..... 87
Diagram IV.20 Diagram Kesiapan Sistem Informasi atas Pernyataan Nomor 1 ..... 89
Diagram IV.21 Diagram Kesiapan Sistem Informasi atas Pernyataan Nomor 2 ..... 90
Diagram IV.22 Diagram Kesiapan Sistem Informasi atas Pernyataan Nomor 3 ..... 92
Diagram IV.23 Diagram Kesiapan Sistem Informasi atas Pernyataan Nomor 4 ..... 94

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Setelah Riset

Lampiran 2 : Kuesioner

Lampiran 3 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 5 : Sertifikat Toefl

Lampiran 6 : Sertifikat KKN UMP

Lampiran 7 : Sertifikat Lulus Membaca Al Qur'an

Lampiran 8 : Biodata Penulis

# ABSTRAK

**Fitri Andriani/222011345/2015/Pemahaman dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)/ Akuntansi Sektor Publik.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang? 2) Bagaimanakah kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang, dan 2) Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pemerintah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Variabel pada penelitian ini adalah pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual dan kesiapan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual, dengan indikator kesiapan berupa kesiapan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku pemerintahan kota Palembang masih banyak yang belum memahami mengenai SAP 2010. Namun, secara kesiapan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, pemerintah kota Palembang telah siap.

**Kata Kunci: Pemahaman, kesiapan, standar akuntansi pemerintahan basis akrual**

## *ABSTRACT*

***Fitri Andriani / 222011345/2015 / Understanding and Local Government Readiness In Accrual Based Financial Statements (Case Study on the Regional Government Agency of Palembang) / Public Sector Accounting***

*The problems of this study are 1) How can understanding the local government in the preparation of government financial statements based on the accrual of local government bodies in Palembang? 2) How does the readiness of local authorities in the preparation of financial statements in the accrual-based government of Palembang local government bodies ?. The purpose of this study is 1) To know the understanding of local governments in the preparation of financial statements in the accrual-based government of Palembang local government bodies, and 2) To determine the readiness of local authorities in the preparation of government financial statements based on the accrual of local government bodies in Palembang. This research was conducted in Palembang City Government Agency. This research used comparative study. The variable in this study is an understanding in the preparation of the financial statements and the accrual-based government readiness in preparation of financial statements accrual-based government, the readiness indicator in the form of readiness commitment, human resources, facilities and infrastructure, as well as information systems. The data used in this study are primary data with data collection using questionnaire and interview.*

*These results indicate that the perpetrators of Palembang city administration are still many who do not understand the SAP 2010. However, in the readiness of the commitment, human resources, facilities and infrastructure, as well as information systems, Palembang city government has prepared.*



***Keywords:*** ***Understanding, readiness, government accounting standards on an accrual basis***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices.*

Pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No.24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Adanya penetapan PP No.71 Tahun 2010 maka penerapan system akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No.17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis

akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja, dapat menyajikan informasi yang lebih baik atas berkelanjutan dari suatu kebijakann yang diambil, dan mampu mendorong untuk lebih fokus pada output daripada input suatu program.

KSAP (2006: 3), akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual bukan berarti hadir tanpa masalah. Beberapa Negara yang menerapkan system akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di Negara Malaysia misalnya, seperti dibanyak Negara berkembang, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi akuntansi profesional (Saleh dan Pendlebury, 2006). Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementrian, auditor, pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan dibidang akuntansi keuangan (Juta Tikk, 2010). Pada pulau Fiji ada terlalu banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (GeoffreyTickell, 2010).

Ada beberapa penelitian tentang pemahaman maupun kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Salah satunya, penelitian tentang kesiapan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Indra, *et al* (2015). Dari hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai di bagian akuntansi pada Pemerintahan Kota Manado menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah di Kota Manado dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua

pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sebaiknya perlu diadakan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat kepada SKPD terkait.

Palembang merupakan salah satu kota yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada dipemerintahan.

Disisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan

Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung atau pun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kota Palembang harus menerapkan SAP pada masing-masing SKPD yang ada. Setelah mengadakan survey pendahuluan pada SKPD Kota Palembang ternyata ada SKPD yang telah paham dan siap dalam menerapkan basis akrual da nada yang belum paham dan siap. Berikut hasil wawancara dari beberapa SKPD Kota Palembang:

**Tabel I.1**
**Hasil Survei Pendahuluan**

| | |
|---|---|
| Badan Lingkungan Hidup | SKPD telah memahami dan siap dalam penerapan basis akrual, akan tetapi belum mengetahui laporan keuangan berbasis akrual. |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | SKPD telah siap dalam menerapkan basis akrual, namun pemahaman mengenai basis akrual itu sendiri belum sepenuhnya dimengerti oleh seluruh SDM bagian keuangan. |
| Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan | SKPD telah memahami mengenai basis akrual, namun belum siap untuk menerapkan basis akrual tersebut dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. |

***Sumber: Penulis, 2015***

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis persiapan pemerintah kota Palembang untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Palembang dalam menerapkan basis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Pemahaman dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Akrual Basis (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang?
2. Bagaimanakah kesiapan pemerintah daerah penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pemerintah daerah penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual pada badan pemerintah daerah kota Palembang.

## D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terutama dalam hal pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual.

2. Bagi Badan Pemerintah Kota Palembang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual,serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa akuntansi sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Titik Setyaningsih (2013) yang berjudul Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan karyawan pemerintah daerah dan local dimengerti parlemen untuk sistem akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan Studi Kasus Penelitian (CSR) pendekatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur dengan para pejabat dan parlemen di pemerintah daerah Surakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat saling pengertian sistem akrual berdasarkan Pemerintah Standar Akuntansi 2010 karyawan dan local parlemen baik pemerintah daerah, masih rendah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eka (2014) yang berjudul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah khususnya PPK SKP dalam menerapkan SAP berbasis akrual ditinjau dari

aspek: (1) tingkat dan latar belakang pendidikan, (2) pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah, (3) pemahaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual (PP 24/2005), dan (4) pemahaman terhadap basis akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui menyebaran keusioner dan dilanjutkan wawancara mendalam.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Oktaviani *et al* (2014) yang berjudul *Overview* Implementasi *Accrual-Based Budgeting* pada Entitas Pemerintahan: Studi Literatur. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemahaman tentang *accrual-based budgeting,* bagaimana implementasi *accrual-based budgeting* di beberapa Negara, apa perbedaan antara *cash-based budgeting* dan *accrual-based budgeting,* apa kelebihan dan kelemahan *accrual-based budgeting* dan jenis pengambilan keputusan seperti apa yang dapat diambil dengan menggunakan *accrual-based budgeting,* serta bagaimana agar *accrual-based budgeting* dapat diimplementasikan di entitas pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan studi kepustakaan tentang implementasi *accrual-based budgeting* pada entitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif intrepretif dengan teknik studi literatur. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian.

Yusi (2013) dengan judul Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menyusun laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 dan menganalisis perbedaan antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 serta merekap hasil wawancara untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi *full accrual basic* pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 jika mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dan strategi-strategi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dalam penerapan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

Ari Widyastuti *et al* (2015) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui: 1) bagaimana kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menerapkan SAP berbasis akrual, 2) bagaimana kesiapan sistem informasi akuntansi (SIA) pemerintah Kabupaten

Gianyar dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan bagaimana komitmen organisasi dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretatif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) pengambilan keputusan atau verifikasi.

Indra *et al*(2015) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai dari bagian akuntansi. Analisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif.

**Tabel II.1**
**Persamaan dan Perbedaan**

| Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|
| Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Derah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta) (Titik,2013) | 1.Sama-sama meneliti mengenai *accrual based.*<br>2.Sama-sama meneliti tentang pemahaman pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual.<br>3.Salah satu metode analisis datanya sama yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. | 1. Penelitian sekarang menggunakan dua variabel yaitu kesiapan dan pemahaman<br>2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif-studi kasus. |

| | | |
|---|---|---|
| Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2011 (Yusi, 2013) | Sama-sama meneliti mengenai penerapan *accrual based*. | 1.Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan metode komparatif.<br>2.Penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kuesioner.<br>3.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu perbandingan SAP 2005 dengan SAP 2010,sedangkan penelitian sekarang menggunakan tabelaris. |
| *Overview* Implementasi *Accrual-Based Budgeting* pada Entitas Pemerintahan: Studi Literatur (Oktaviani *et al,* 2014) | 1.Sama-sama meneliti tentang pemahaman pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual.<br>2.Sama-sama menggunakan metode kualitatif. | 1.Penelitian sebelumnya tidak meneliti tentang kesiapan mengenai SAP berbasis akrual.<br>3.Metode penelitian sebelumnya dilanjutkan dengan metode intrepretif, sedangkan penelitian sekarang dilanjutkan dengan metode deskritif.<br>4.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah studi literatur, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tabelaris.<br>5.Penelitian terdahulu menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian sekarang berupa data primer. |
| Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan | 1. Sama-sama meneliti mengenai *accrual based.*<br>2. Sama-sama meneliti tentang kesiapan | 1. Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pemahaman SAP berbasis akrual.<br>2. Penelitian terdahulu |

| | | |
|---|---|---|
| Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar (Ari *et al*, 2015) | pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual. | menggunakan metode kualitatis-interpretatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kuantitatif-kualitatif.<br>3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. |
| Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual (Indra *et al*, 2015) | 1. Sama-sama meneliti mengenai *accrual based.*<br>2. Sama-sama meneliti tentang kesiapan pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual. | 1. Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pemahaman SAP berbasis akrual.<br>2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, sedangkan penelitian sekarang berupa kuesioner.<br>3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data berupa wawancara, sedangkan penelitian sekarang berupa tabelaris.<br>4. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatis-interpretatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kuantitatif-kualitatif. |

***Sumber: Penulis, 2015***

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Pemahaman

Suharsismi (2009: 118), menjelaskan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan membedakan menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas,

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

Sudjana (2007: 22), menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, dimana diperlukan adanya hubungan antara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari hasil pemahaman tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Indokator dalam pemahaman meliputi daya serap pegawai untuk memaknai dari suatu kegiatan untuk menunjukkan tingkat prestasi, mengindikasikan pengajaran atau tuntunan yang dimiliki, dan mampu menjelaskan makna dari basis akrual.

## 2. Konsep Kesiapan

Slameto (2003: 113), menjelaskan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk

memberi respon. Kondisi mencakup setidak-tidaknya tiga aspek yaitu: (1) kondisi fisik, mental dan emosional, (2) kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, (3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.

Oemar (2008: 94), menjelaskan bahwa kesiapan adalah tingkatan atau keadaaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah kondisi atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan dan membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban pada tingkatan pertumbuhan (1) fisik, mental, emosional, (2) kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan, serta (3) keterampilan, pengetahuan, sosial, dan pengertian lain yang dipelajari.Indikator dalam kesiapan meliputi komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi.

## 3. Standar Akuntansi Pemerintah

### a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (www.wikiapbn.com).

Dari kedua pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.

**b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

Fakhrurazi dalam Indra *et all* (2015: 623) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai

kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

## 4. Akuntansi Berbasis Akrual

### a. Pengertian Basis Akrual

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006: 3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu

memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

**b. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual**

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Menurut KSAP (2006: 1), dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar.Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan.Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya.Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Mardiasmo (2002: 155), menjelaskan bahwa pengaplikasian *accrual* basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual* basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*).

Bastian (2006: 118-119), menjelaskan bahwa keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Kemudian menurut Bastian (2006: 120), menjelaskan bahwa beberapa

masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

## 5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

### a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual.Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terdapat di lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemeringtahan yang berbasis akrual.Sementara lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pendapat lainnya dikemukan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam standar akuntansi pemerintahan jika menggunakan basis akrual, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

**b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Mulyana (2009: 13), menjelaskan bahwa penerapan basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam.Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dalam *time frame* pendek, maupun *time frame medium*. Penerapan akuntansi akrual dalam *time frame* pendek (katakanlah 1-3 tahun) akan beresiko timbulnya *reform fatigue* yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung.

Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *time frame medium* (katakanlah, 4-6 tahun). Penerapan secara *time frame medium* dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di pemerintah pusat yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*; kemudian apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek

akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya.

**6. Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan**

Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*big bang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan diseluruh kementrian/lembaga.

b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementrian/lembaga pada saat semua kementrian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan disemua kementrian/lembaga pada tahun2015.

**Tabel II.2**
**Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual Secara Bertahap**

| | |
|---|---|
| 2010 | a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual<br>b. Mengembangkan *Framework* Akuntansi Berbasis Akrual<br>c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual |
| 2011 | a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi<br>b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail *requirement*)<br>c. Pengembangan kapasitas SDM |
| 2012 | a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan)<br>b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |

| | |
|---|---|
| 2013 | a. Ploting beberapa KL dan BUN<br>b. *Review*, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK<br>c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2014 | a. *Pararel Run* dan Konsolidasi seluruh LK<br>b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK<br>c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |
| 2015 | a. Implementasi penuh<br>b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) |

***Sumber: KSAP, 2006***

## 7. Kendala Akuntansi Berbasis Akrual

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menurut Simanjuntak (2010: 10-12) adalah sebagai berikut:

a) Sistem akuntansi dan *IT based system*

Kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Ketidaksiapan sistem akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang baru dengan basis akrual. Selain itu, perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Hal tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang system pengendalian intern pemerintah.

b) Komitmen dari pimpinan

Setiap perubahan membutuhkan dukungan penuh oleh pimpinan suatu institusi.Hal ini merupakan kunci keberhasilan atas perubahan tersebut. Komitmen yang kuat akan mendorong implementasi secara menyeluruh perubahan basis akuntansi yang memang tidak mudah. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.

c) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Di samping itu,

peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang lebih kompleks dengan batasan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentu saja membutuhkan individu-individu yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai.Namun pada kenyatannya, jumlah sumber daya manusia yang dapat memenuhi tuntutan tersebut masih belum mencukupi.Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi agar penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Resistensi terhadap perubahan

Layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan.Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut Satmoko (2010: 6-9), menjelaskan bahwa kendala penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu sebagai berikut:

a) Kompleksitas laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal

tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.

b) Kondisi pemerintah. Kondisi pemerintah meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan.

c) Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat berdampak pada jangka waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan, serta dapat berpengaruh pada jangka waktu pemeriksaan BPK RI mengingat laporan yang harus disiapkan lebih banyak dibandingkan dengan SAP sebelumnya sesuai PP No.24 tahun 2005.

d) Kondisi pengendalian internal pemerintah yang belum memadai.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2012: 16), menjelaskan bahwa jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variable atau lebih dari satu variabel.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitiana sosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan mengenai pemahaman dan kesiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan *accrual basic* pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada badan pemerintah daerah Kota Palembang yang dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

**Tabel III.1**
**Daftar Lokasi Penelitian**

| Nama Badan Pemerintah Daerah | Alamat Badan Pemerintah Daerah |
|---|---|
| Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Jl. Merdeka No. 03 Palembang 30132 Telp: (0711) 358272 |
| Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Jl. Merdeka No. 08 Palembang Telp: (0711) 312011-113 |
| Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat | Jl. Merdeka No. 252 Palembang 30131 Telp: (0711) 357279 |
| Badan Pengawas Pembangunan Daerah | Jl. Merdeka No. 74 Telp: (0711) 353522, 367486 |
| Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah | Jl. Ki Kemas Umar No. 84 Kel. 22 Ilir Palembang 30131 Telp/Fax: (0711) 364115 |
| Badan Lingkungan Hidup | Jl. Lunjuk Jaya No. 02 (Demang Lebar Daun) Palembang 30151 Telp: (0711) 310154 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jl. Lunjuk Jaya No. 03 (Demang Lebar Daun) Telp: (0711) 368726 |
| Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi | Jl. Jendral Bambang Utoyo Kel. 5 Ilir Palembang |
| Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan | Jl. Demang Lebar Daun No. 03 (Bukit Besar) Telp: (0711) 445985 |

***Sumber: www.Palembang.go.id, 2015***

## C. Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2012: 49), menjelaskan bahwa operasionalisasi variable adalah defenisi yang diberikan kepada variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variable tersebut diukur, kemudian ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variable dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.2 sebagai berikut:

**Tabel III.2**
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel | Definisi Variabel | Indikator Variabel |
|---|---|---|
| 1. Pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual | Kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, dimana diperlukan adanya hubungan antara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. | Mampu menjelaskan makna dari pelaporan keuangan berbasis akrual. |
| 2. Kesiapan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual | Kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. | a. Komitmen<br>b. Sumber daya manusia<br>c. Infrastruktur<br>d. Sistem informasi |

***Sumber: Penulis, 2015***

## D. Populasi

Sugiyono (2012: 115), menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada masing-masing Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan, dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut:

**Tabel III.3**
**Daftar Jumlah Populasi**

| No | Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 3 Pegawai |
| 2. | Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | 5 Pegawai |
| 3. | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat | 8 Pegawai |
| 4. | Badan Pengawas Pembangunan Daerah | 7 Pegawai |
| 5. | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah | 5 Pegawai |
| 6. | Badan Lingkungan Hidup | 5 Pegawai |
| 7. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 Pegawai |
| 8. | Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi | 5 Pegawai |
| 9. | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan | 5 Pegawai |
| | **Jumlah Pegawai** | 49 Pegawai |

***Sumber: Penulis, 2015***

## E. Data Yang Diperlukan

Danang (2013: 21-22), menjelaskan bahwa ada dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya tanpa perantara.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan atau dari sumber lainnya yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa jawaban responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian menggunakan kuesioner, kuesioner yang diberikan berisi item-item pertanyaan yang terdapat dalam instrument penelitian, yaitu pemahaman dan

kesiapan sebagai variable independen, dan laporan keuangan pemerintah dan *accrual basic* sebagai variable dependen. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner.

## F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2012: 402-425), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

   Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*faca to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Kuesioner (angket)

   Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan sesuai dengan yang akan diteliti, sedangkan wawancara hanya dilakukan pada survey pendahuluan.

## G. Analisis Data dan Teknik Analisis

### 1. Analisis Data

Sugiyono (2012: 13-14), menjelaskan bahwa analisis data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk

melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil kuesioner.

**2. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengguanakan tabellaris dan uraian penjelasan mengenai pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah:

a. Mengisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban YA atau TIDAK.
b. Menjumlahkan berapa banyak jawaban YA.
c. Dan dari semua jawaban YA dibagi dengan total pertanyaan pada masing-masing variable kemudian dikalikan dengan 100%

$$\%\,Jawaban = \frac{Jumlah\ jawaban\ YA}{Total\ seluruh\ pertanyaan} 100\%$$

Setelah didapat persentase dari masing-masing variabel maka dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman dan kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Profil Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang

#### a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan(BKB-PP) Kota Palembang

Guna memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidang BKB-PP Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKB-PP Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Penduduk tumbuh seimbang menuju Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan gender melalui kelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

**b. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kota Palembang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada Pasal 25. Dibentuklah (BPB-PK) Kota Palembangdengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 5 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja BPB-PK Kota Palembang.Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BPB-PK Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya rasa aman pada masyarakat dari bencana dan bahaya kebakaran.

2) Misi

a) Peningkatan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana BPB-PK yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

b) Peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

c) Terselenggaranya sosialisasi BPB-PK serta target retribusi alat pemadam kebakaran.

d) Tersedianya sarana atau prasarana penyelamatan bencana dan proteksi kebakaran, serta penyelamatan jiwa pada bangunan gedung.

**c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kota Palembang**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang.BKD dan Diklat Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang kepegawaian daerah dan diklat berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKD dan Diklat Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Pelayanan dan manajemen kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, inovatif dan sejahtera dalam rangka mendukung terwujudnya Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Mewujudkan sumber daya aparatur yang beriman, profesional, visioner dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)

**d. Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang. BAPPEDA Kota Palembang adalah unsur

perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BAPPEDA Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

   Terwujudnya BAPPEDA Kota Palembang yang handal, professional dan berkualitas.

2) Misi

   a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota.

   b) Meningkatkan kompetensi BAPPEDA Kota Palembang sebagai lembaga perencanaan.

**e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang**

Berdirinya BKPMD Kota Palembang tepatnya pada Bulan November 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah BKPMD Kota Palembang merupakan salah satu Badan yang fungsinya melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan investor baik masalah tempat perizinan maupun koordinasi dengan instansi lainnya.Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BKPMD Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya investor untuk berinvestasi di Kota Palembang

2) Misi

a) Mewujudkan pelayanan prima kepada dunia usaha khususnya masyarakat umum.

b) Meningkatkan kerjasama antar instansi maupun antar dunia usaha dan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.

c) Menyiapkan dan memperbaiki perangkat hukum yang berkaitan dengan penanaman modal.

d) Meningkatkan sosialisasi, promosi dan temu investor.

e) Menyiapkan database yang berkenaan dengan peluang dan potensi penanaman modal.

**f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan KESBANGPOL) Kota Palembang**

Badan KESBANGPOL Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 4 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pada Badan KESBANGPOL Kota Palembang dan peraturan Walikota Nomor: 47 Tahun 12 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan KESBANGPOL Kota Palembang.Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh Badan KESBANPOLTahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam pembangunan melalui pembentukan masyarakat yang partisipatif, beradab dan demokratis.

2) Misi

a) Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan.

b) Peningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

c) Pengembangan sistem politik yang demokratis.

d) Perwujudan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif.

**g. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidanglingkungan hidup Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan.Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BLH Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Pengelolaan lingkungan Kota Palembang secara terpadu menuju Kota berwawasan lingkungan.

2) Misi

a) Meningkatkan kemampuan aparatur.

b) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

**h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Palembang**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Palembang Nomor: 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Palembang dibidangBPMK Kota Palembang adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BPMKTahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan aparatur dan kelembagaan masyarakat dan kelurahan.

2) Misi

a) Meningkatkan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat.

b) Meningkatkan manajemen lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.

c) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

d) Meningkatkan peran perempuan di kelurahan Kota Palembang.

**i. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (BARPUSDOK) Kota Palembang**

Berdirinya Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang 31 Desember 2003 itu masih dalam bentuk kantor dan diresmikan sebagai Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang itu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2008. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah BARPUSDOK Kota Palembang.Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh BARPUSDOK Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1) Visi

Mewujudkan lembaga arsip, perpustakaan dan dokumentasi yang profesional dalam mendukung Palembang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (EMAS) 2018.

2) Misi

Meningkatkan sistem pengolahan dan pelayanan arsip, perpustakaan dan dokumentasi melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

**2. Struktur Organisasi**

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Kota Palembang

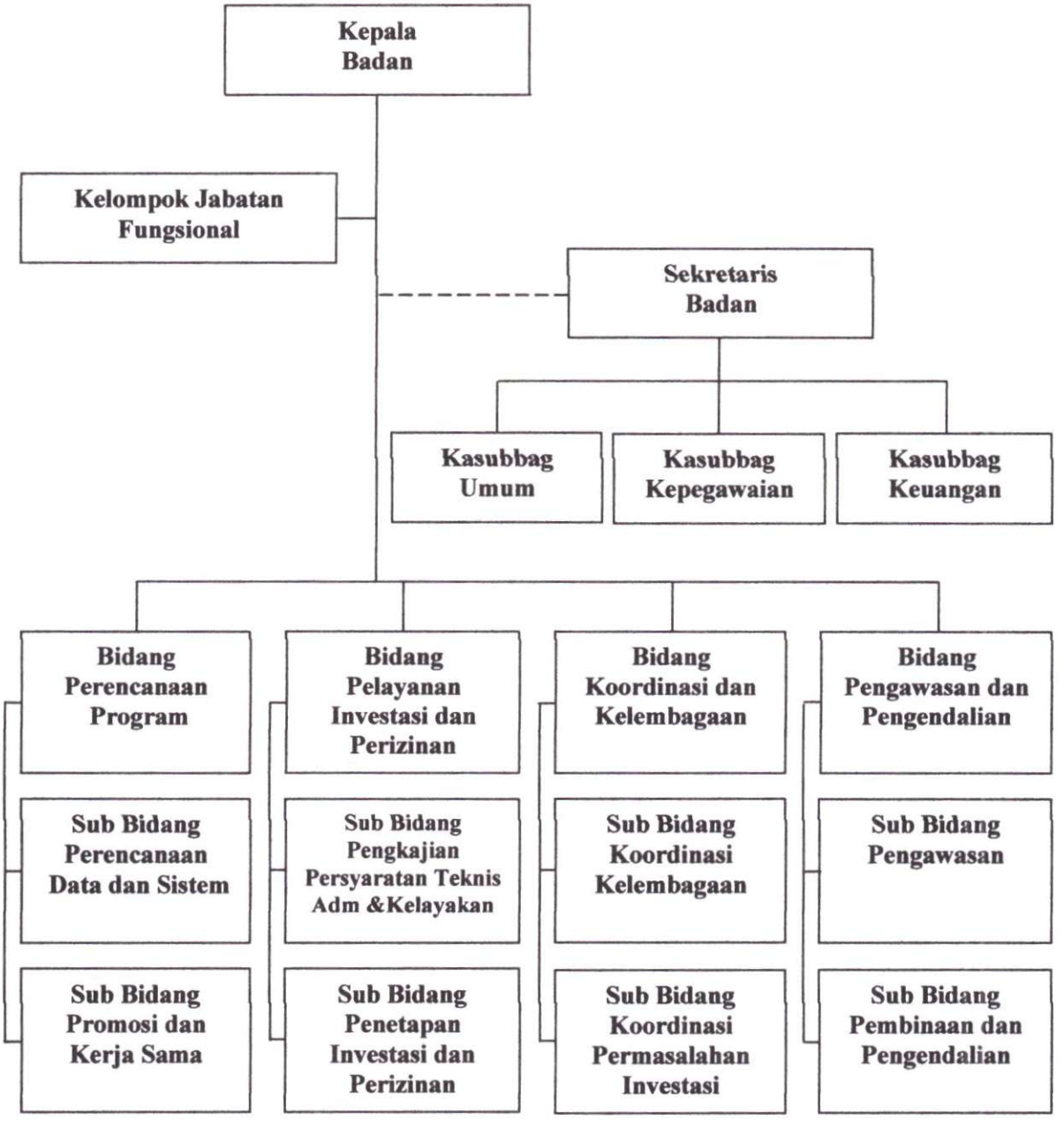


***Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang, 2015***

**3. Tugas Pokok dan Fungsi**

a. Kepala Badan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan program dan kegiatan dibidang koordinasi penanaman modal daerah sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2) Fungsi

a) Memimpin kegiatan Badan dan urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.

b) Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Badan.

c) Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang koordinasi penanaman modal daerah.

d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koordinasi penanaman modal daerah.

e) Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan investasi baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.

f) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.

g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

1) Tugas Pokok

Melaksanakan urusan administrasi yang meliputi: pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

2) Fungsi

a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.

b) Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.

c) Pengelolaan urusan keuangan.

d) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan serta rumah tangga.

2) Fungsi

a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian umum.

b) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum.

c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Badan.

d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan serta perlengkapan Badan.

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

2) Fungsi

a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan sub bagian kepegawaian.

b) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian Badan.

c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Badan.

d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Badan.

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Sub Bagian Keuangan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Badan, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan.

2) Fungsi

a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan bagian keuangan.

b) Pengelolaan urusan administrasi keuangan.

c) Penyusunan rencana anggaran pembiayaan.

d) Penyelenggaraan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan akuntansi.

e) Penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## B. Pembahasan

### 1. Gambaran Karakteristik Responden

Jumlah kuesioner yang disebar adalah 49, kuesioner yang dikembalikan menjadi sumber data untuk diolah dan dianalisis adalah 40 kuesioner.

**a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

**Tabel IV.1**
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No. | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Laki-laki | 16 | 40% |
| 2. | Perempuan | 24 | 60% |
| Total | | 40 | 100% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Berdasarkan tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden laki-laki berjumlah 16 orang dengan persentase 40% dan responden perempuan berjumlah 24 orang dengan persentase 60%.

**b. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

| No. | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Umur < 30 Tahun | 12 | 30% |
| 2. | Umur 31-40 Tahun | 21 | 52,5% |
| 3. | Umur > 41 Tahun | 7 | 17,5% |
| Total | | 40 | 100% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Berdasarkan tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa responden berumur di bawah 30 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 30%, responden berumur 31-40 tahun berjumlah 21 orang dengan

persentase 52,5% dan responden berumur di atas 41 tahun berjumlah 7 orang dengan persentase 17,5%.

**c. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhirdapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut:

**Tabel IV.3**
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| No. | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | SMA | 4 | 10% |
| 2. | Diploma | 8 | 20% |
| 3. | Sarjana | 22 | 55% |
| 4. | Pasca Sarjana | 6 | 15% |
| Total | | 40 | 100% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Berdasarkan tabel IV.3dapat disimpulkan bahwa responden bependidikan terakhir SMA berjumlah 4 orang dengan persentase 10%, responden berpendidikan terakhir Diploma berjumlah 8 orang dengan persentase 20%, responden berpendidikan terakhir Sarjana berjumlah 22 orang dengan persentase 55% dan responden berpendidikan terakhir Pasca Sarjana berjumlah 6 orang dengan persentase 15%.

**2. Rekapitulasi Jawaban Responden**

Pemahaman dan kesiapan penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual (studi kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) dengan menggunakan tabelaris kuesioner yang diterima sebanyak 40 sebagai berikut:

**a. Pemahaman**

Hasil rekapitulasi jawaban komitmen dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

**Tabel IV.4**
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**
**Variabel Pemahaman**

| Pernyataan | Ya | | Tidak | |
|---|---|---|---|---|
| | ∑ | % | ∑ | % |
| P1 | 10 | 25% | 30 | 75% |
| P2 | 13 | 32,5% | 27 | 67,5% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**b. Komitmen**

Hasil rekapitulasi jawaban komitmen dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

**Tabel IV.5**
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**
**Variabel Komitmen**

| Pernyataan | Ya | | Tidak | |
|---|---|---|---|---|
| | ∑ | % | ∑ | % |
| P1 | 40 | 100% | | |
| P2 | 40 | 100% | | |
| P3 | 37 | 92,5% | 3 | 7.5% |
| P4 | 37 | 92,5% | 3 | 7,5% |
| P5 | 35 | 87,5% | 5 | 12,5% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**c. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hasil rekapitulasi jawaban sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat pada tabel IV.5 sebagai berikut:

**Tabel IV.6**
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**
**Variabel Sumber Daya Manusia (SDM)**

| Pernyataan | Ya | | Tidak | |
|---|---|---|---|---|
| | ∑ | % | ∑ | % |
| P1 | 36 | 90% | 4 | 10% |
| P2 | 37 | 92,5% | 3 | 7,5% |
| P3 | 38 | 95% | 2 | 5% |
| P4 | 35 | 87,5% | 5 | 12,5% |
| P5 | 37 | 92,5% | 3 | 7,5% |
| P6 | 37 | 92,5% | 3 | 7,5% |
| P7 | 38 | 95% | 2 | 5% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**d. Sarana dan Prasarana**

Hasil rekapitulasi jawaban sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel IV.6 sebagai berikut:

**Tabel IV.7**
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**
**Variabel Sarana dan Prasarana**

| Pernyataan | Ya | | Tidak | |
|---|---|---|---|---|
| | ∑ | % | ∑ | % |
| P1 | 36 | 90% | 4 | 10% |
| P2 | 38 | 95% | 2 | 5% |
| P3 | 35 | 87,5% | 5 | 12,5% |
| P4 | 36 | 90% | 4 | 10% |
| P5 | 37 | 92,5% | 3 | 7,5% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**e. Sistem Informasi**

Hasil rekapitulasi jawaban sistem informasi dapat dilihat pada tabel IV.7 sebagai berikut:

**Tabel IV.8**
**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner**
**Variabel Sistem Informasi**

| Pernyataan | Ya | | Tidak | |
|---|---|---|---|---|
| | ∑ | % | ∑ | % |
| P1 | 33 | 82,5% | 7 | 17,5% |
| P2 | 33 | 82,5% | 7 | 17,5% |
| P3 | 34 | 85% | 6 | 15% |
| P4 | 33 | 82,5% | 7 | 17,5% |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**3. Pembahasan**

**a. Variabel Pemahaman Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual**

1) Saya memiliki pengetahuan yang memadai tentang tujuan SAP berbasis akrual.

**Tabel IV.9**
**Pemahaman Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 1**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 10 | 25% |
| Jumlah jawaban TIDAK | 30 | 75% |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

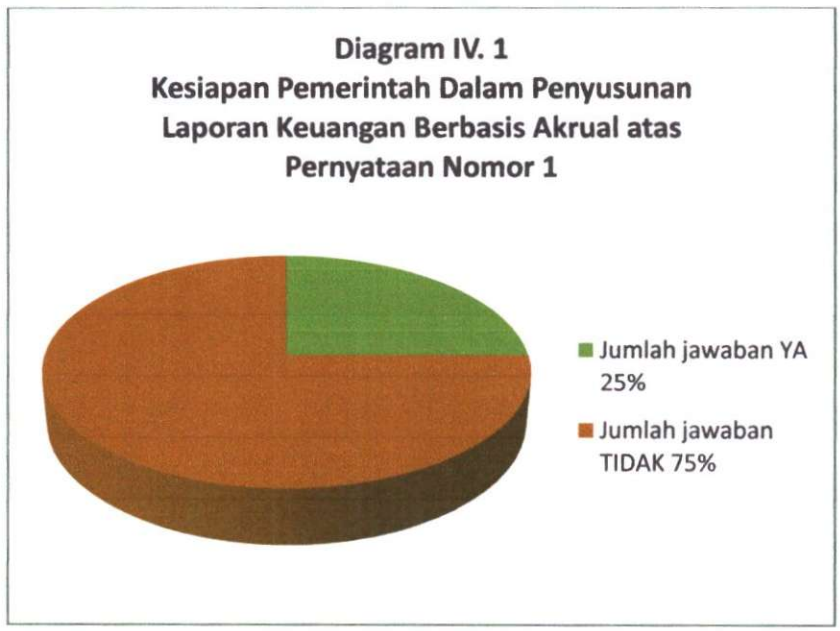


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.9 dapat dilihat secara garis besar bahwa responden sebanyak 10 orang atau 25% menyatakan YA, dan sebanyak 30 orang atau 75% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Bapak Kms. H. Panji, S.E. menyatakan bahwa menurutnya basis akrual merupakan suatu suatu standar pemerintahan dimana mengakui kejadian ekonomi itu pada saat trjadinya kejadian, bukan pada saat menerima kas.

Pernyataan YA juga dinyatakan oleh Ibu Suryana, S.E. bahwa menurutnya basis akrual dapat memberikan gambaran utuh posisi keuangan, artinya sudah dapat mengetahui seberapa banyak kekayaan yang dimiliki instansi, hutang dan lain sebagainya. Basis ini juga dapat melihat berapa keuntungan yang dimiliki di awal sebelum kas diterima.

Responden yang menyatakan tidak paham sebanyak 75%. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Sri Meka Melasari, bahwa menurutnya basis akrual hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial. Jika basis ini diterapkan, seolah seperti dipaksakan. Namun yang terpenting menurutnya adalah kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan anggaran untuk kemudian membuat pelaporan yang diminta atasan.

Hal ini didukung juga oleh pernyataan responden Bapak Hendra Bitra Setiawan yang menyatakan bahwa beliau belum bisa menganalisis seluruh laporan keuangan pemerintah basis akrual. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa secara normatif beliau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, tidak perlu pemahaman mengenai SAP basis akrual, cukup mengikuti kebiasaan terdahulu.

2) Saya paham aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadi trnasaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP 2010.

**Tabel IV.10**
**Pemahaman Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 13 | 32,5% |
| Jumlah jawaban TIDAK | 27 | 67,5% |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**Diagram IV. 2**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

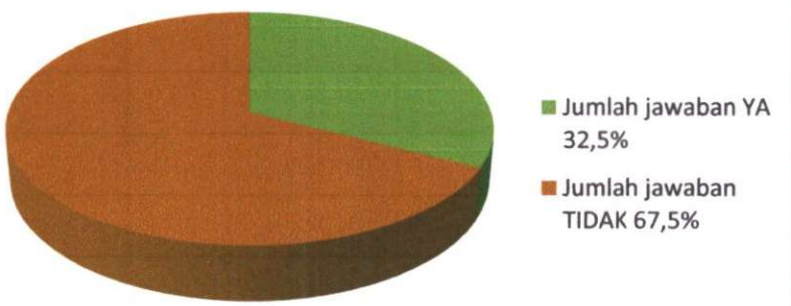


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.10 dapat dilihat secara garis besar bahwa responden sebaanyak 13 orang atau 32,5% menyatakan YA, dan 27 orang atau 67,5% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Ibu Suryana, S.E. menyatakan bahwa sesuai dengan mengertian SAP basis akrual, dimana suatu kejadian diakui pada saat trjadinya kejadian tersebut, bukan pada saat menerima kas.

Hal ini didukung oleh pernyatan yang diungkapkan oleh Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa sistem akrual bisa langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan, pendapatan sudah langsung diakui. Pada akhir tahun, ketika pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang. Begitu jiga belanja. Namun, hal ini akan menimbulkan banyak jurnal, menurutnya bisa sampai empat kali jurnal sampai dengaan tahap pelaksanaan pencairan dananya.

Responden yang menyatakan TIDAK memiliki beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa instansi tempat beliau bekerja masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual, namun secara bertahap akan menuju akrual penuh. Pendapatan dan beban akrual belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk pelaksanaan. Jadi beliau belum memahami sepenuhnya mengenai pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyatan dari Bapak Supartono, bahwa untuk penerapan ke peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 beliau belum mau ikut, artinya beliau belum memahaminya. Pemahaman beliau hanya sebatas dasarnya saja. Tapi karena sudah menjadi tugas dan menjadi peraturan pemerintah maka haruslah dilaksanakan.

**b. Variabel Kesiapan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual**

**1) Indikator Komitmen**

a) Anda memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung asas, visi dan misi pemakainan SAP berbasis akrual.

**Tabel IV.11**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 1**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 40 | 100 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 0 | 0 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

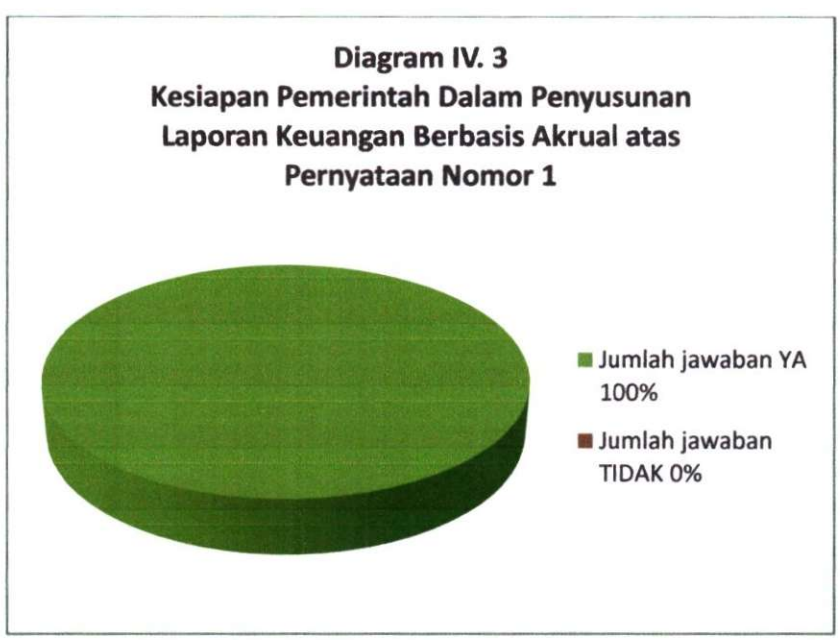


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.11 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 40 orang atau 100% menyatakan YA, dan tidak ada orang atau 0% menyatakan TIDAK. Hal ini

menunjukkan bahwa responden telah memiliki kesiapan komitmen utama dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi asas, visi dan misi SKPD.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden. Seluruh responden menyatakan YA. M. Rendi Ardiansyah mengatakan; secara komitmen, saya selalu berkomitmen karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap pegawai pemerintahan, termasuk saya. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Noor Andiwijaya; saya selalu berkomitmen penuh pada peraturan pemerintah. Marhenry juga mengungkapkan; komitmen harus selalu ada dalam diri, apalagi saya merupakan aparatur pemerintahan, dan kesiapan komitmen akan segala peraturan pemerintah itu udah ditumbuhkan sejak saya masuk menjadi aparatur pemerintahan.

b) Anda memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan.

**Tabel IV.12**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 40 | 100 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 0 | 0 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

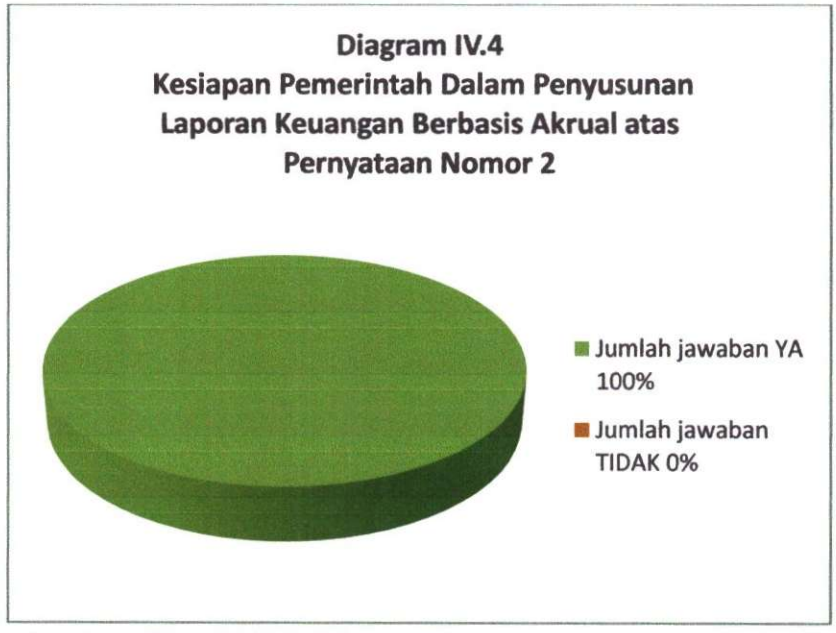


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.12 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 39 orang atau 97,5% menyatakan YA, dan 1orang atau 2,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kesiapan komitmen dalam hal kedisipilinan dan bertanggung jawab terhadap tugas untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu: Bapak Kms. H. Panji, S.E. menyatakan bahwa dalam hal kedisiplinan, setiap pegawai memang harus memiliki kedisiplinan, karena mengingat laporan keuangan pun harus disajikan tepat waktu. Bagaimana bisa jika pegawai tidak disiplin, bisa menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa: pada dasarnya SAP basis akrual ini lebih rumit dibanding sistem yang lama, maka dari itu kedisiplinan sangatlah penting, disisi lain mereka juga telah berkomitmen terhadap pekerjaan sesuai dengan aturan pemerintah daerah maupun pusat.

Ibu Sri Meka Melasari juga menyatakan bahwa kedisiplinan adalah hal yang paling penting. Karena kedisiplinan merupakan tonggak keberhasilan dalam suatu usaha.

c) Pemerintah mempunyai sikap komitmen dan integritas pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.13**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 3**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

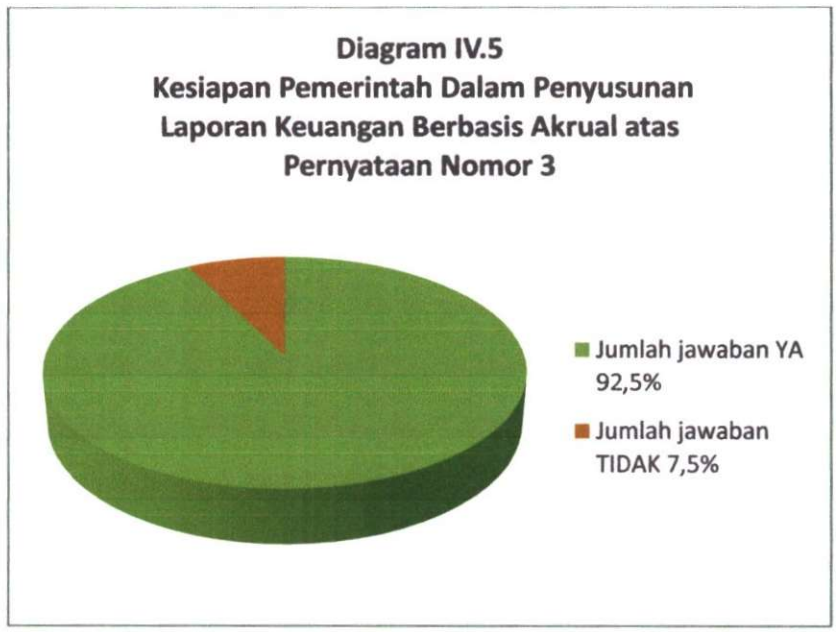


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.13 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Palembang telah memiliki kesiapan komitemen dan integritas pembangunan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada responden yang menyatakan YA. Kms. H. Panji, S.E. menyatakan; Dilihat dari sisi integritas dan komitmen dalam pembangunan SAP, saya menilai cukup baik. Integritas dan komitmen itu penting dalam melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh. Hal ini dikarenakan adanya integritas dan komitmen menjadi landasan kuat untuk

keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh dalam pemerintah daerah kota Palembang.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa secara komitmen dan integritas, beliau selalu berkomitmen dan berintegritas penuh terhadap pembangunan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan.

Namun, beberapa alasan responden yang menyatakan TIDAK seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Supatono bahwa secara komitmen dan integritas, beliau memang berkomitmen dan berintegritas, namun jika dikatakan komitmen dan integritas terhadap pembanguna SAP basis akrual beliau belum siap, karena beliau belum memahamai apa itu SAP baisi akrual.

d) Pemerintah mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.14**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 4**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

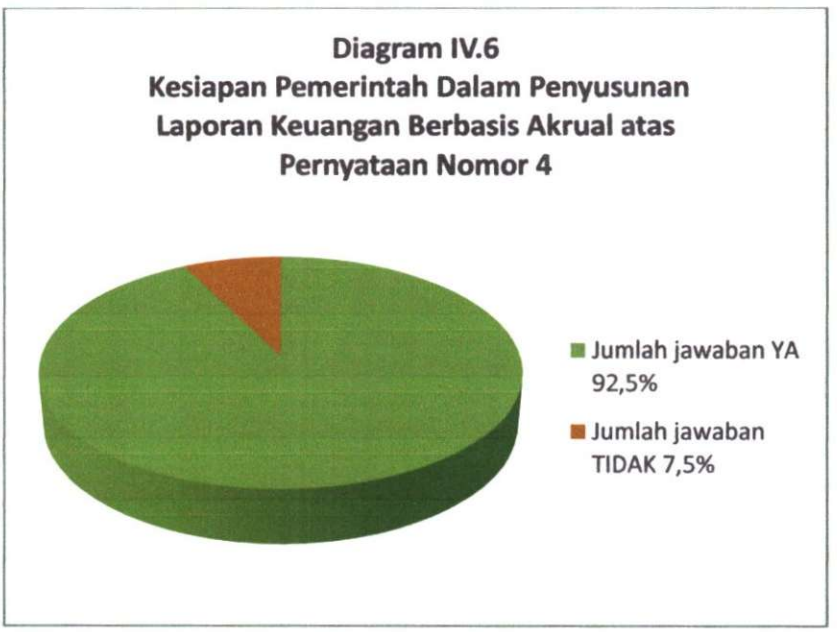


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.14 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu seperti yang dinyatakan oleh Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa strategi pendekatan yang humanis, transaparan, demokratis dan akuntabel dalam pembangunan SAP basis akrual akan menciptakan pemerintahan yang baik *(good governance)*, dan juga dapat memperkecil ruang gerak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Sri Meka Melasari bahwa pada dasarnya memang prinsip pelaporan keuangan pemerintahan bersifat transparan atau terbuka.

e) Pemerintah mempunyai strategi pendekatan yang humanis, transparan, demokratis, dan akuntable dalam pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.15**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 5**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 35 | 87,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 5 | 12,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

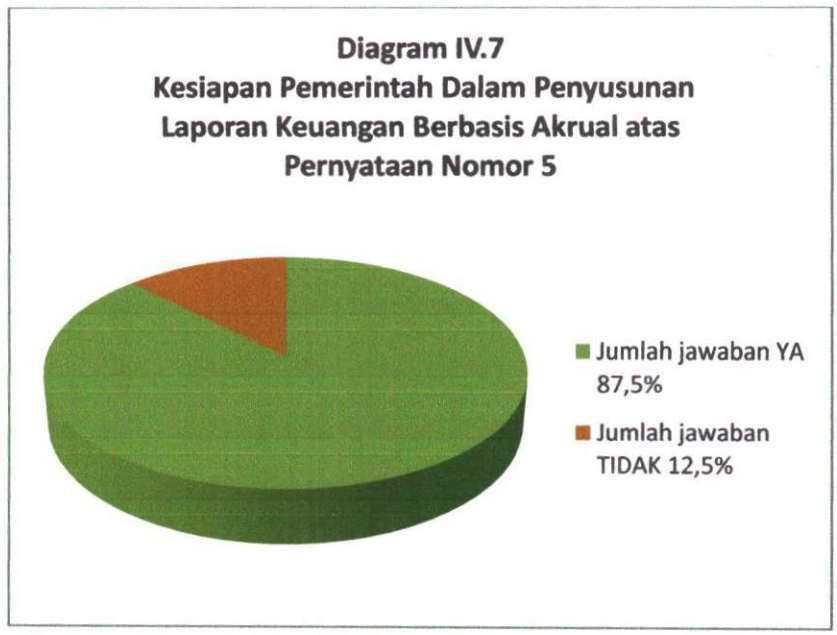


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.15 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 35 orang atau 87,5% menyatakan YA, dan 5 orang atau 12,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki suatu strategi pendekatan yang humanis, transparansi, demokratis, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan SAP berbasis

akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA adalah pernyataan dari Ibu Sri Meka Melasari bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berkomitmen penuh pada strategi pendekatan humanis, transparan, demokratis, dan akuntabel dalam pelaksanaan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah menurutnya dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan yang transaparan, demokratis, dan akuntabel menjadi komitmen dari bupati.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa strategi pendekatan yang humanis, transparan, demokratis dan akuntabel dalam pembangunan SAP basis akrual akan menciptakan pemerintahan yang baik *(good governance)*, dan juga dapat memperkecil ruang gerak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Beberapa responden yang menyatakan TIDAK memiliki beberapa alasan seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yesi Oktaria bahwa mereka belum menetapakan strategi pendekatan dalam pembangunan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah, hanya saja memang pelaporan keuangan pemerintahan haruslah bersifat transparan.

**2) Indikator Sumber Daya Manusia**

a) Pemerintah memiliki integritas dalam pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.16**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 1**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 36 | 90 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 4 | 10 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

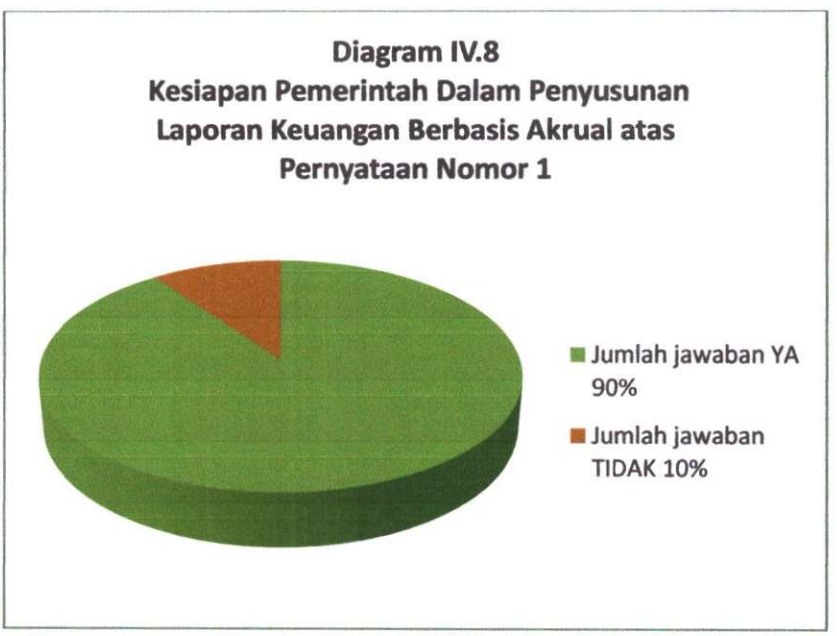


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.16 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 36 orang atau 90% menyatakan YA, dan 4 orang atau 10`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Ibu Sri Meka Melasari menyatakan bahwa beliau mempunyai integritas untuk

menerapakan SAP basis akrual. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Hendra Bitra Setiawan bahwa mengenai integritas, setiap instansi yang berada di tingkat SKPD seluruhnya menerima apapun yang menjadi aturan pemerintah pusat.

Responden yang menyatakan TIDAK memiliki alasan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yudhi F. Bahwa beliau masih bingung mengenai pelaksanaan SAP akrual sehingga beliau juga bingung bagaimana harus berintegritas.

b) Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan (*Reward and punishment*) untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP.

**Tabel IV.17**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

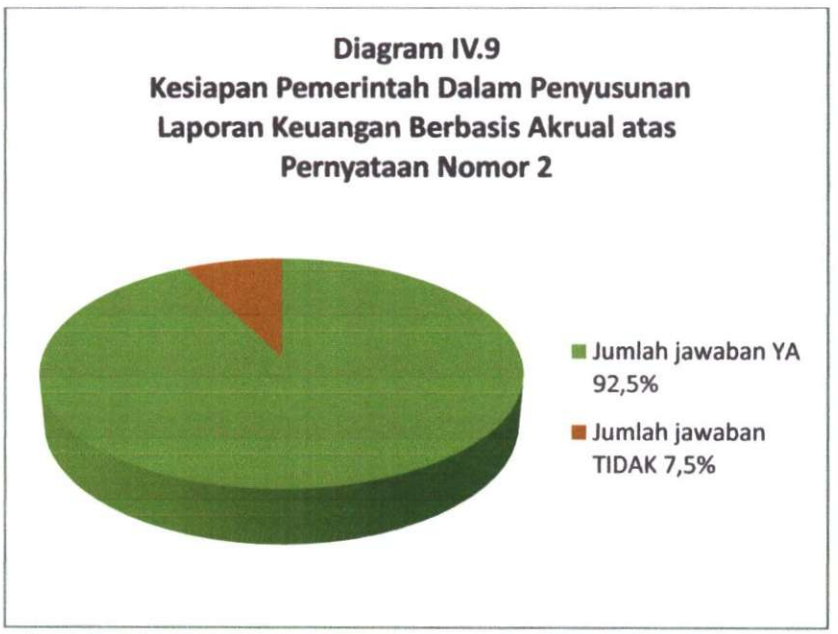


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.17 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Bapak Noor Andiwijaya menyatakan bahwa sudah tentu setiap pegawai pasti menginginkan penghargaan (*reward*) atas prestasi kerjanya agar dapat terus mendongkrak semangat kerjanya dan memang jika pegawai melakukan kesalahan pegawai juga siap menerima sanksi *(punihment*). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa beliau pun membutuhkan penghargaan *(reward)* atas prestai kerja yang diraih sebagai pendukung optimasi bidang tugas pemerintahan.

Responden yang menyatakan TIDAK beralasan bahwa bagi nya suatu pengabdian itu tidak harus dibayar dengan apa pun. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Supartono

c) Pemerintah membutuhkan dukungan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang keuangan dengan menggunakan SAP.

**Tabel IV.18**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 3**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 38 | 95 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 2 | 5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

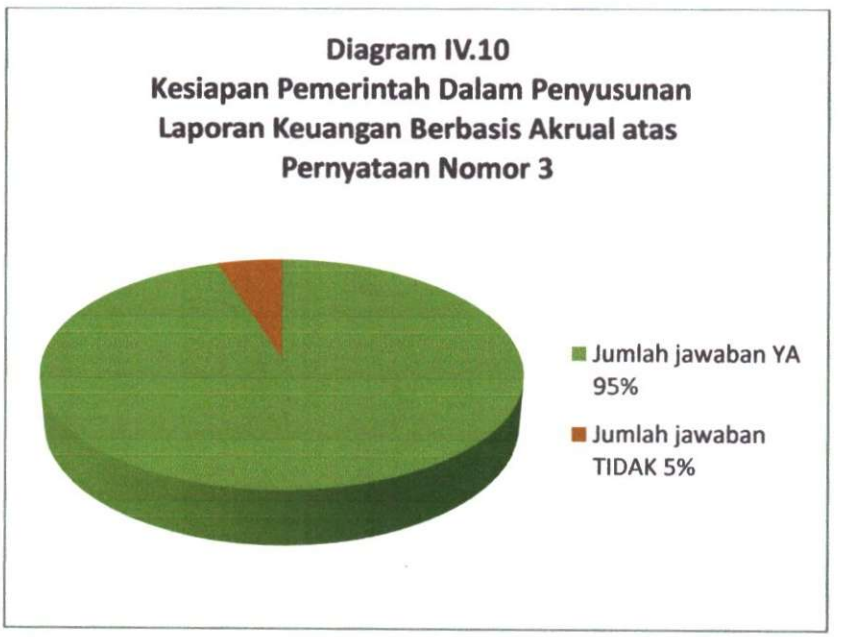


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.18 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 38 orang atau 95% menyatakan YA, dan 2 orang atau 5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Ibu Suryana, S.E bahwa ruangan kerja dan lingkungan yang baik sangat penting, karena dapat mempengaruhi kinerja pegwai juga menjadi baik. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Arman bahwa untuk bisa pegawai bekerja dengan baik dan optimal maka ruangan kerja yang nyaman dan lingkungan yang baik juga diperlukan.

Hal tidak sependapat dinyatakan oleh Bapak Supartono bahwa ruang kerja yang ada sudah cukup nyaman baginya jadi tidak perlu menghambur-hamburkan anggaran untuk merenovasi ruang kerja maupun lingkungan kerja.

d) Pemerintah memiliki/membutuhkan adanya dorongan dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan menggunakan SAP di bidang keuangan.

**Tabel IV.19**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 4**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 35 | 87,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 5 | 12,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**Diagram IV.11**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 4**

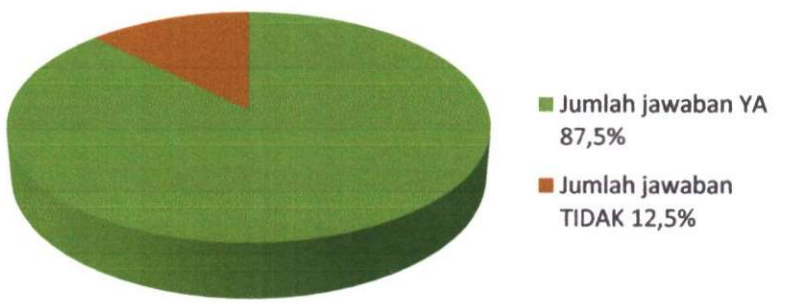


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.19 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 35 orang atau 87,5% menyatakan YA, dan 5 orang atau 12,5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Bapak Noor Andiwijaya menyatakan bahwa sudah tentu setiap pegawai pasti menginginkan promosi atasan atas prestasi kerja agar dapat mendongkrak semangat kerjanya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa beliau pun membutuhkan promosi atasan atas prestai kerja yang diraih sebagai pendukung optimasi bidang tugas pemerintahan.

Responden yang menyatakan TIDAK beralasan bahwa bagi nya suatu pengabdian itu tidak harus dibayar dengan apa pun. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Supartono

e) Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkunganny aman baik khususnya untuk mampu meningkatkan optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP di bidang keuangan.

**Tabel IV.20**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 5**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

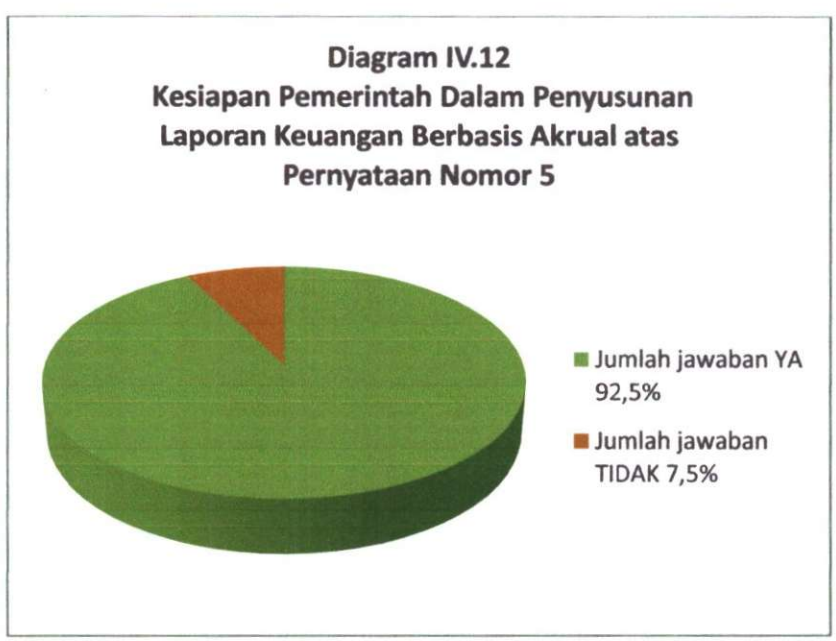


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.20 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Ibu Suryana, S.E bahwa ruangan kerja dan lingkungan yang baik sangat penting, karena dapat mempengaruhi kinerja pegwai juga menjadi baik. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Arman bahwa untuk bisa pegawai bekerja dengan baik dan optimal maka ruangan kerja yang nyaman dan lingkungan yang baik juga diperlukan.

Hal tidak sependapat dinyatakan oleh Bapak Supartono bahwa ruang kerja yang ada sudah cukup nyaman baginya jadi tidak perlu menghambur-hamburkan anggaran untuk merenovasi ruang kerja maupun lingkungan kerja.

f) Anda membutuhkan promosi atasan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.21**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 6**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**Diagram IV.13**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 6**

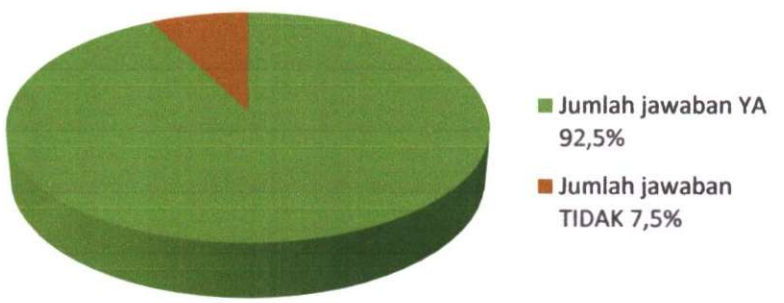


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.21 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia haruslah didukung dengan promosi atasaan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Bapak Noor Andiwijaya menyatakan bahwa sudah tentu setiap pegawai pasti menginginkan promosi atasan atas prestasi kerja agar dapat mendongkrak semangat kerjanya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa beliau pun

membutuhkan promosi atasan atas prestai kerja yang diraih sebagai pendukung optimasi bidang tugas pemerintahan.

Responden yang menyatakan TIDAK beralasan bahwa bagi nya suatu pengabdian itu tidak harus dibayar dengan apa pun. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Supartono

g) Anda memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah.

**Tabel IV.22**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 7**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 38 | 95 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 2 | 5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

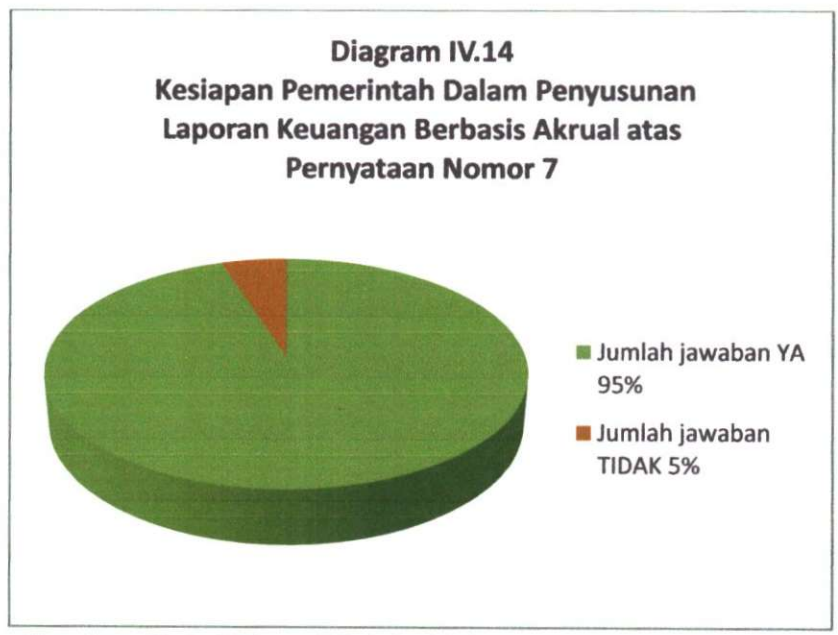


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.22 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 38 orang atau 95% menyatakan YA, dan 2 orang atau 5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Palembang telah memiliki kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan SAP basis akrual sebagai sarana mendukung optimasi bidaang tugaa pemerintah.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan dari Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa dari sisi pegawai yang berlatar belakang akuntansi telah siap melaksanakan SAP basis akrual. Karena menurutnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP basis akrual memang harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai akuntansi yang akan mengerjakannya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Arman bahwa kemampuan yang sesuai yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia dalam hal ini pegawai akuntansi haruslah didukung dengan kesiapan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP basis akrual.

Beberapa alasan responden yang menyatakan TIDAK diungkapkan oleh Bapak Noor Andiwijaya bahwa untuk menghasilkan sumber daya yang kompeten itu tidaklah harus yang berpendidikan sesuai asalkan sumber daya manusia tersebut mau belajar dan bekerja keras maka ia pun bisa menyamai kemampuan sumber daya manusia yang lainnya.

**3) Indikator Sarana dan Prasarana**

a) Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk operasi SAP.

**Tabel IV.23**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 1**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 36 | 90 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 4 | 10 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

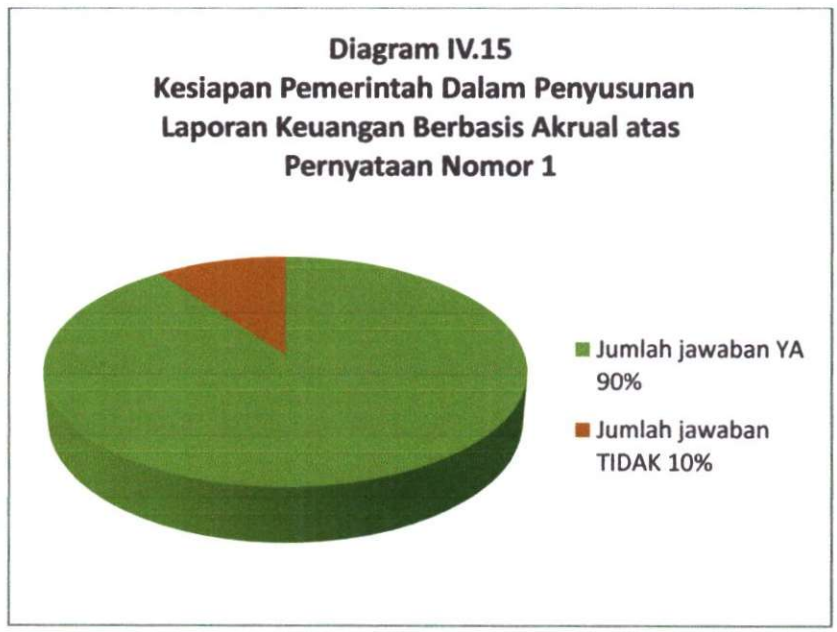


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.23 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 36 orang atau 90% menyatakan YA, dan 4 orang atau 10`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Palembang telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana berupa perangkat lunak husus untuk operasi SAP basis akrual.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa instansi telah didukung penuh dengan sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual yang disebut SIMDA.

Namun, ada beberapa responden yang menyatakan TIDAK, berikut alasan mereka: Pernyataan dari Ibu Sri Meka Melasari bahwa beliau mereka mengetahui akan perangkat

lunak tersebut, namun belum sampai pada instansi mereka. Ibu Anita Kartini, A.Md juga menyatakan bahwa belum ada perangkat lunak khusus untuk SAP basis akrual.

b) Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi yang berkesinambungan khususnya untuk operasi SAP.

**Tabel IV.24**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 38 | 95 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 2 | 5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

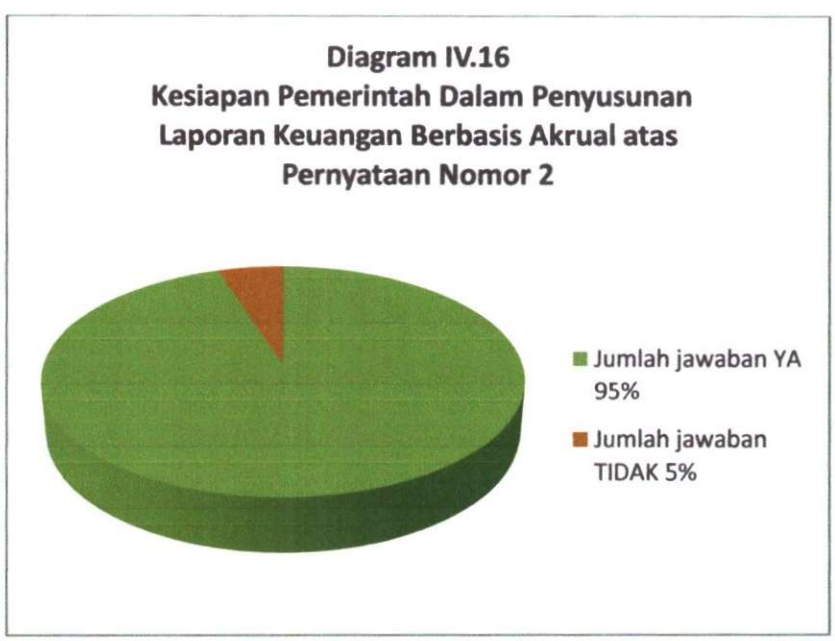


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.24 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 38 orang atau 95% menyatakan YA, dan 2 orang atau 5`% menyatakan TIDAK. Hal ini meunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Palembang telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana berupa basis data pendukung operasionalisasi yang berkesinambungan untuk operasi SAP basis akrual.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa sarana dan prasarana baik itu perangkat lunak maupun basis data sebagai pendukung operasionalisasi telah lengkap dan telah berjalan. Namun, terkadang pengoperasiannya sedikit terkendala dengan koneksinya yang terkadang terputus-putus.

Responden yang menyatakan TIDAK memiliki alasan juga seperti yang dinyatakan oleh Bapak Hendra Bitra Setiawan bahwa instansinya belum menerima basis data maupun perangkat lunak. Jadi, mereka masih menggunakan sistem lama dalam penyusunan laporan keuanagan pemerintah. Namun nanti, pada saat pelaporan akhir tahun baru akan menggunakan basis akrual.

c) Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana administrasi yang memadai khususnya untuk operasi SAP.

**Tabel IV.25**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 3**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 35 | 87,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 5 | 12,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

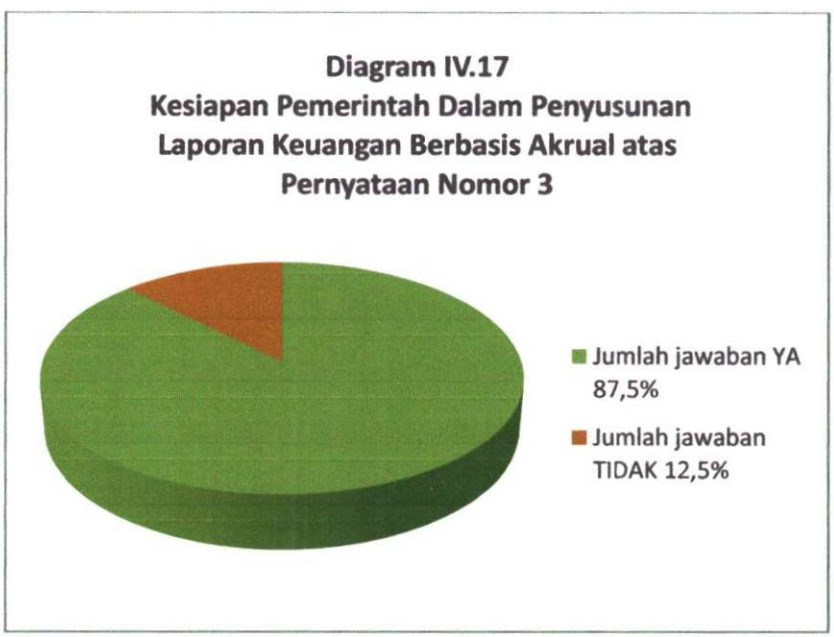


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.25 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 35 orang atau 87,5% menyatakan YA, dan 5 orang atau 12,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Palembang telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana karena telah memiliki dukungan

sarana administrasi yang memadai untuk mengoperasikan SAP basis akrual.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Bapak Arman bahwa dukungan sarana administrasi telah memadai, karena fasilitas sarana dan prasarana pengoperaisan SAP basis akrual sebagian berasal dari alokasi anggaran. Sama halnya yang dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kerja SAP basis akrual telah dianggarkan di dalam anggaran pemerintah belanja daerah (APBD).

Responden juga ada yang menyatakan TIDAK, berikut alasannya: Ibu Suryana, S.E. beliau tidak tahu darimana dana untuk memfasilitasi sarana dan prasarana seluruhnya mulai dari sosialisasi sampai pengoperasian SAP basis akrual penuh, namun biasanya dari APBD.

d) Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi SAP.

**Tabel IV.26**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 4**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 36 | 90 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 4 | 10 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

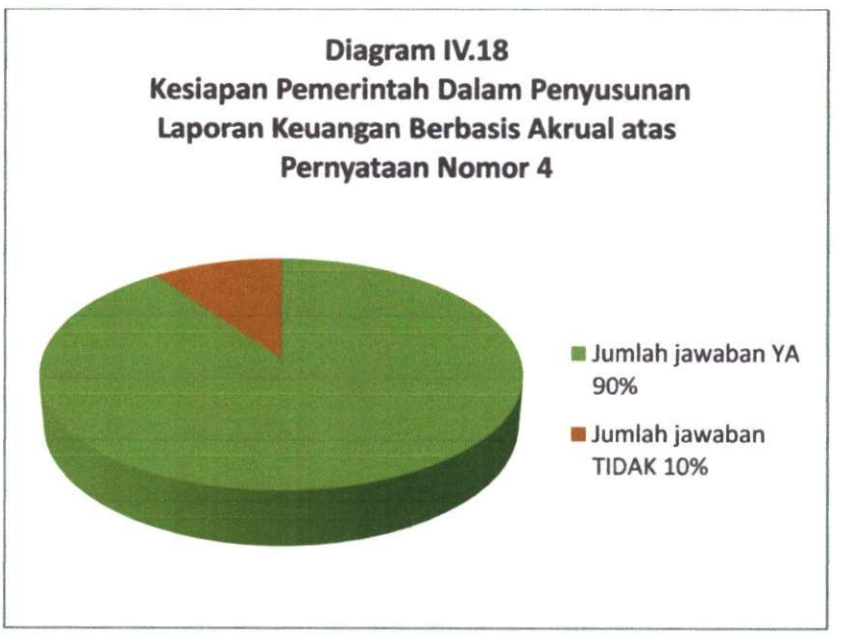


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.26 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 36 orang atau 90% menyatakan YA, dan 4 orang atau 10`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Palembang telah memiliki kesiapan berupa anggaran yang memadai untuk mengoperasikan SAP basis akrual.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Bapak Arman bahwa dukungan sarana administrasi telah

memadai, karena fasilitas sarana dan prasarana pengoperaisan SAP basis akrual sebagian berasal dari alokasi anggaran. Sama halnya yang dinyatakan oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kerja SAP basis akrual telah dianggarkan di dalam anggaran pemerintah belanja daerah (APBD).

Responden juga ada yang menyatakan TIDAK, berikut alasannya: Ibu Suryana, S.E. beliau tidak tahu darimana dana untuk memfasilitasi sarana dan prasarana seluruhnya mulai dari sosialisasi sampai pengoperasian SAP basis akrual penuh, namun biasanya dari APBD.

e) Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sumber daya manusia berkualitas yang memadai khususnya untuk operasi SAP.

**Tabel IV.27**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 5**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 37 | 92,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 3 | 7,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

**Diagram IV.19**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 5**

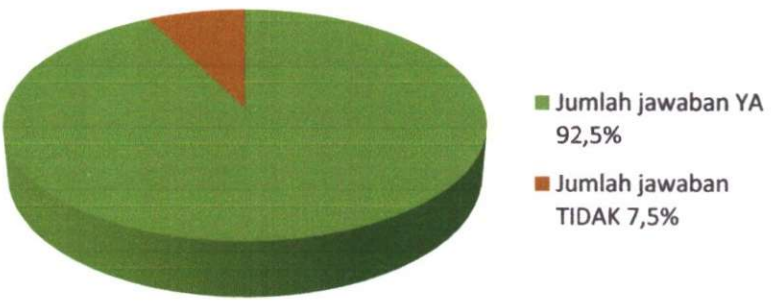


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.27 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 37 orang atau 92,5% menyatakan YA, dan 3 orang atau 7,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Palembang telah memiliki kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengoperasikan SAP basis akrual.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan dari Ibu Sri Meka Melasari bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu penerapan SAP basis akrual lebih terjamin dan berjalan lancar karena sumber daya manusia (SDM) telah ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.

Bebrapa responden juga ada yang menyatakan TIDAK, berikut alasannya yang dilontarkan oleh Ibu Suryana, S.E. bahwa secanggih apapun sarana dan prasarana yang digunakan jika memang pada dasarnya sumber daya manusianya tidak memahami makna serta ini dari SAP basis akrual itu sendiri maka tidak juga akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

**4) Indikator Sistem Informasi**

a) Pemerintah didukung oleh sistem Manajemen Informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten.

**Tabel IV.28**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 1**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 33 | 82,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 7 | 17,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

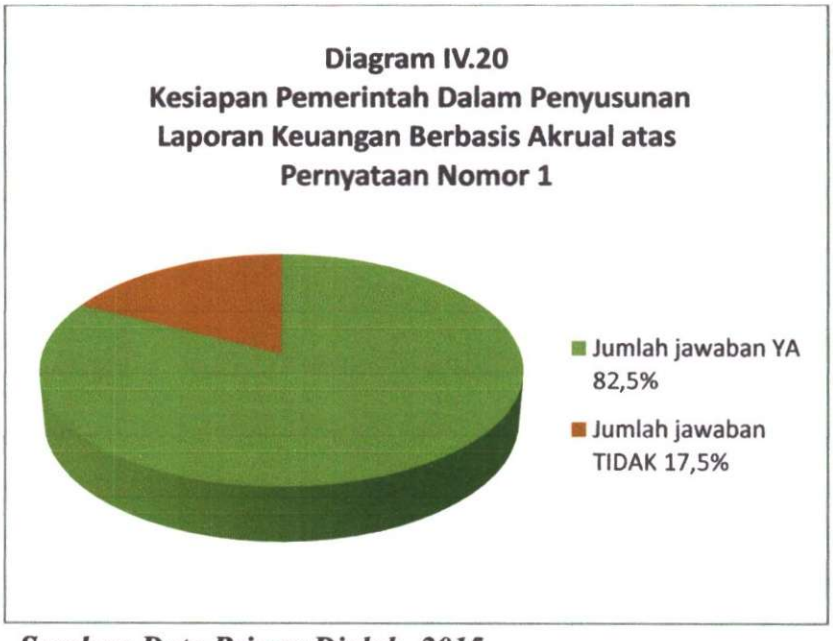


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.28 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 33 orang atau 82,5% menyatakan YA, dan 7 orang atau 17,5`% menyatakan TIDAK.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu: Bapak Kms. H. Panji,S.E. menyatakan bahwa mereka telah didukung oleh sistem manajamen informasi yang disebut SIMDA. SIMDA merupakan sistem informasi manajemen daerah yang berbasis akrual.

Namun, ada beberapa alasan responden yang menyatakan TIDAK. Ibu Anita Kartini, A.Md. menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya menggunakan SAP basis akrual. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sri Meka Melasari bahwa mereka belum menerima sistem manajemen yang baru yang telah berbasis akrual sepenuhnya.

b) Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali.

**Tabel IV.29**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 2**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 33 | 82,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 7 | 17,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

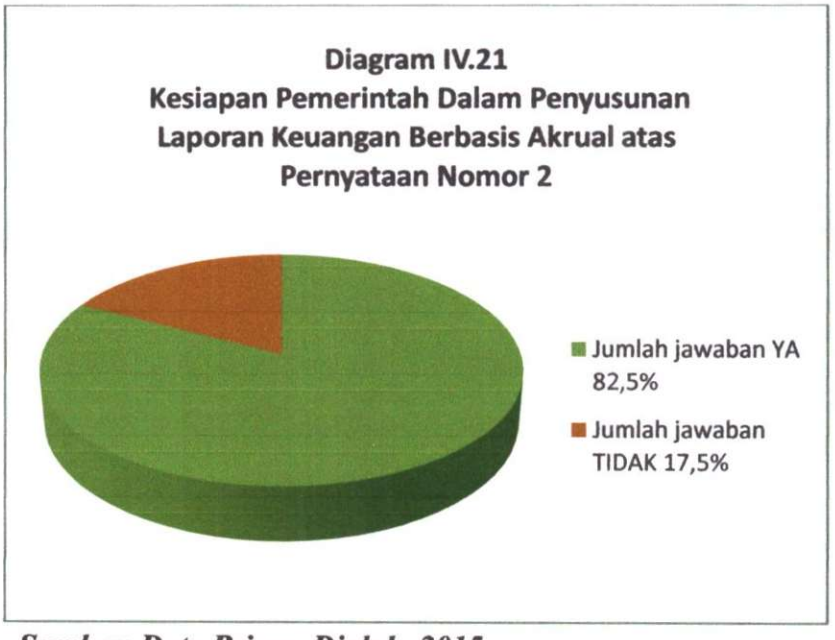


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.29 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 33 orang atau 82,5% menyatakan YA, dan 7 orang atau 17,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota palembang telah

memiliki kesiapan sistem informasi karena telah didukung oleh sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual yang implementatif.

Hasil wawancara yang penulis lakukan beberapa alasan responden menyatakan YA yaitu sebagai berikut: Pernyataan Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa instansi telah didukung penuh dengan sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual yang disebut SIMDA.

Namun, ada beberapa responden yang menyatakan TIDAK, berikut alasan mereka: Pernyataan dari Ibu Sri Meka Melasari bahwa beliau mereka mengetahui akan perangkat lunak tersebut, namun belum sampai pada instansi mereka. Ibu Anita Kartini, A.Md juga menyatakan bahwa belum ada perangkat lunak khusus untuk SAP basis akrual.

c) Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP.

**Tabel IV.30**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 3**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 34 | 85 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 6 | 15 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

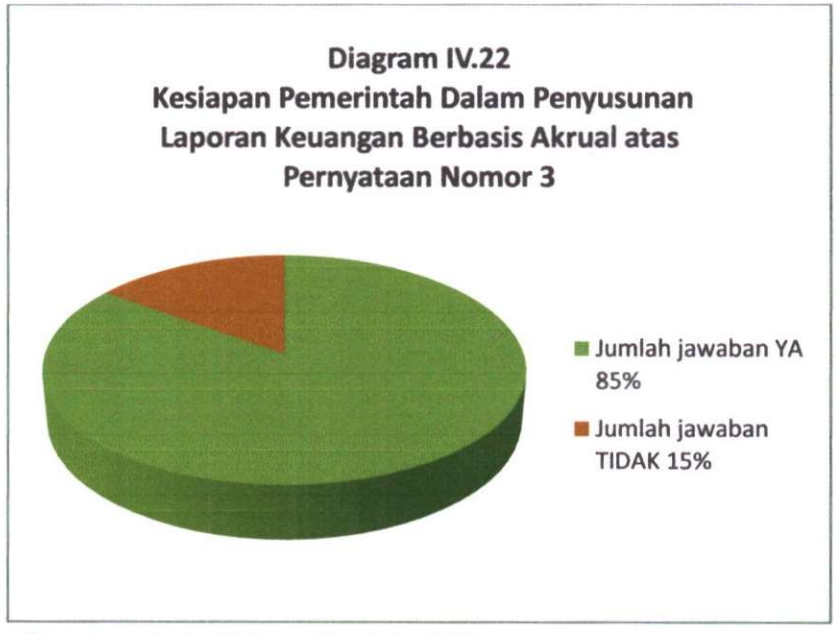


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.30 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 34 orang atau 85% menyatakan YA, dan 6 orang atau 15`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kesiapan sumber daya manusia karena telah didukung pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual.

Hasil wawancara yang penulis laksanakan beberapa alasan mereka memilih YA yaitu sebagai berikut: Bapak Hendra Bitra Setiawan menyatakan bahwa pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual telah dilakukan sebanyak dua kali. Sama hal nya yang dinyatakan oleh Ibu Sri Meka Melasari bahwa pelatihan

peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual telah dilakukan sebanyak empat kali.

Namun, ada beberapa responden yang menyatakan TIDAK, berikut alasan responden tersebut menyatakan TIDAK: Bapak Elwani menyatakan bahwa secara pribadinya beliau belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak M. Deny Saputra bahwa beliau memang pernah mengikuti pelatihan, namun itu bukanlah pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sisteem perangkat lunak, namun sosialisasi mengenai SAP berbasis akrual.

d) Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan system perangkat lunak SAP.

**Tabel IV.31**
**Kesiapan Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual atas Pernyataan Nomor 4**

| Keterangan | Responden | % |
|---|---|---|
| Jumlah jawaban YA | 33 | 82,5 |
| Jumlah jawaban TIDAK | 7 | 17,5 |
| Total | 40 | 100 |

***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

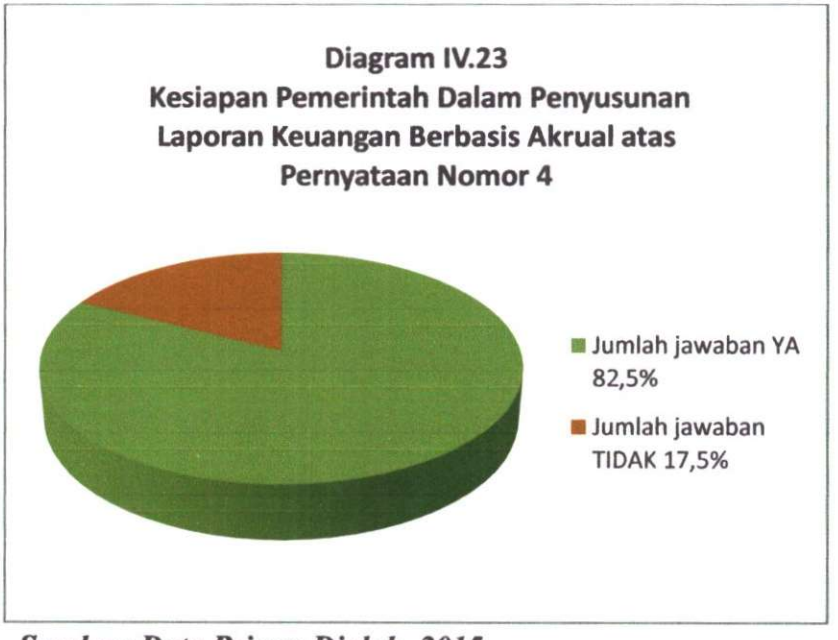


***Sumber: Data Primer Diolah, 2015***

Pada tabel IV.31 dapat dilihat secara garis besar bahwa seluruh responden sebanyak 33 orang atau 82,5% menyatakan YA, dan 7 orang atau 17,5`% menyatakan TIDAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mempunyai kesiapan dalam mengoperasionalisasikan pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual.

Hasil wawancara yang penulis laksanakan beberapa alasan responden menyatakn YA yaitu sebagai berikut: Ibu Yesi Oktaria menyatakan bahwa untuk penerapan awal saat ini memang diperlukan pendampingan dalam mengoperasionalisasikan pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP berbasis akrual. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Leri Susanto bahwa dalam penerapan SAP berbasis

akrual pada tahap pertama ini haruslah ada pendampingan agar SAP berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik.

Beberapa alasan responden yang menyatakan tidak yaitu dinyatakan oleh Bapak Kms. H. Panji, S.E. bahwa tidak perlu ada pendampingan karena mereka telah dibekali pengetahuan dan keahlian dalam penerapan SAP berbasis akrual tersebut, disisi lain memang rata-rata pegawai keuangan memang berasal dari pendidikan yang sejalan dengan pekerjaannya.

Penjelasan yang sama dinyatakan juga oleh Ibu Anita Kartini, A.Md. bahwa penerapan sistem SAP berbasis akrual ini sudah menggunakan sistem online, dan pada saat pelatihan mereka juga sudah cukup paham dalam penerapan SAP basis akrual, serta mereka juga telah diberi software SAP.

# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tingkat pemahaman pemerintah daerah Kota Palembang terhadap SAP 2010 ternyata masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan adanya kerumitan teknik penyusunan pelaporan, dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai SAP 2010.
2. Tingkat kesiapan pemerintah daerah Kota Palembang terhadap SAP 2010 dilihat dari indikator komitmen bahwa aparatur pemerintah Kota Palembang telah siap sepenuhnya untuk berkomitmen dalam pelaksanaan SAP 2010 karena telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hanya saja sistem informasi berupa *software* yang disebut SIMDA belum semua instansi memilikinya. Dilihat dari indikator sumber daya manusia, secara harfiah memang telah siap, namun jika dikaitkan dengan indikator pemahaman, masih dikatakan belum siap.

## B. Saran

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah Kota Palembang. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa hal yang

harus diperhatikan agar implementasi SAP basis akrual dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Pelatihan dan bimbingan kepada SKPD di Kota Palembang hendaknya rutin dilakukan,
3. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelatihan dan bimbingan yang terus berkelanjutan sehingga tercapai pemahaman SAP 2010 yang komprehensif,
4. Sebaiknya pemerintah Kota Palembang meningkatkan koordinasi kepada seluruh SKPD mengenai kebijakan yang ditetapkan dari atasan kepada bawahan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaksana kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA


Ari Widyastuti. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1,* (online), Vol.3, No.1, (http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/slak/article/download/4670/3564, diakses 5 Mei 2015).

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Eka Novalina. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang) (online). (http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/8791847101_abs.pdf, diakses 1 Februari 2015).

Geoffrey Tickell. 2010. Cash To Accrual Acounting: One Nation's Dilemma. *International Business & Economics Research Journal*, (online), Vol.9, No.11, (http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/IBER/article/viewFile/32/30, diakses 2 Februari 2015).

Juta Tikk. 2010. Accounting Changes In The Public Sector In Estonia. Business: Theoryand Practice. *Verslas: Teorija ir praktika Business: Theory and Practice,* (online), Vol.11, No.1, (http://www.researchgate.net/publication/247904958_Accounting_Changes_in_the_Public_Sector_in_Estonia, diakses 2 Februari 2015)

KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia,* (online). Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta, (http://ksap.org/memorandum, diakses tanggal 12 Januari 2015).

Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Indra Franselski, S. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. *Jurnal EMBA,* (online), Vol.3, No.1, Hal.621-630, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/7325/6827, diakses 5 Mei 2015).

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*, (http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasisakrual.pdf, diakses 18 Januari 2015).

Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajarani.* Jakarta: Bumi Aksara.

Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik* (online), (www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php?id=66&kfile=1, diakses 18 Januari 2015).

Slameto. 2010. *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudjana. 2007. *Penelitian Hasil Belajar Mengajar*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Suharsismi Artkunto. 2008. *Prosedur Penelitian.* Rineka Cipta: Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung. CV. Alfabeta.

Titik Setyaningsih. 2013. Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta).*Simposium Nasional Akuntansi XVI,* (online), (http://learning.fe.umy.ac.id/pluginfile.php?file=%2F41828%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FMATERI%2010.pdf, diakses 18 Mei 2015).

Yusi Septia. 2013. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2011. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE),* (online), Vol.2, No.3, (http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/3908, diakses 25 Januari 2015).

Zakiah Saleh & Maurice W. Pendlebury. 2006. Accruals Accounting in Government- Developments in Malaysia. Asia Pacific Business. *Asia Pacific Business Review,* (online), Vol.12, No.4, (http://repository.um.edu.my/52135/1/APBR_AccrualsAccounting.pdf, diakses 2 Februari 2015).

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

JL. JEND. BAMBANG UTOYO, 5 ILIR TELP. 718365
E-mail : BARPUSDOK.PLG@GMAIL.COM,Website : www.barpusdok.palembang.go.id

Palembang, 28 Januari 2015

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palembang

di-
Palembang

mor : 070/ 089 /BARPUSDOK
at : Biasa
mpiran : -
rihal : Mohon Bantuan Data

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis iversitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 517/H-5/FEB-UMP/I/2015, tanggal 22 nuari 2015 perihal Permohonan Bantuan Data, pada prinsipnya kami tidak rkeberatan menerima Mahasiswi tersebut untuk melaksanakan Penelitian atau ngumpulan Data pada Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota lembang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang

**Hj. Asmawati. S.Pd.,MM**
Pembina Tingkat I
Nip. 19631217 198703 2 006

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax. 0711-360986 Kode Pos 30131

Palembang, 04 Maret 2015

or : 070/ 158 /BPB DAN PK/2015
: Biasa
piran : -
al : Izin Pengambilan Data/Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
di –
**PALEMBANG**

Sehubungan dengan surat Kepala KesbangPol tanggal 27 Januari 2015 No.070/139/BAN.KBP/2015 perihal seperti tersebut di atas, maka bersama ini dipermaklumkan bahwa saudara :

| | |
|---|---|
| Nama | : Fitri Andriani |
| N P M | : 222011345 |
| Program | : Ekonomi dan Bisnis |

Untuk Melaksanakan pengambilan data pada instansi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan segala sesuatu biaya yang timbul akibat penelitian tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG**

**Edison, S.Sos, M.Si**
Pembina Tk. I
NIP. 196812081990091001

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
# BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Ki Kemas Umar No. 84 Kel. 22 Ilir Palembang
Telepon : (0711) 364115 Fax : (0711) 364115 Kode Pos 30131
Email : Bkpmd.plg@gmail.com Website : www.bakorpmd.palembang.go.id

Palembang, 29 Januari 2015

omor : 67 /BKPMD/2015
fat :
mpiran :
rihal : Izin Pengambilan Data/Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
di –
Palembang

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palemabang Nomor : 070/139/BAN.KBP/2015 tanggal 27 Janauri 2015 perihal Izin Pengambilan Data/Penelitian Penelitian atas nama :

| *No* | *Nama* | *Nim* | *Judul Penelitian* |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitri Andriani | 222011345 | Pemahaman dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan berbasisi Aktual (Studi kasus pada Badan Pemerintah Kota Palembang |
| 2 | Andi Kusumawanto | 22201114[illegible] | Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi berbasisi komputer terhadap kualitas pelaporan keuangan pada SKPD Badan Pemerintahan Kota Palembang |

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk ***menerima*** melaksanakan Izin Pengambilan Data/Penelitian di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.

Demikian untuk dapat dimaklumi

Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Kota Palembang

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

**Ir. RIDWAN, MM**
Pembina
NIP. 19661215199503 1003

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi**

Alamat : Jl. Jendral Bambang Utoyo Kel. 5 Ilir Palembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Fitri Andriani**

NIM : 22 2011 345

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Program Studi : Akuntansi

Disetujui untuk melakukan riset dengan membagikan kuesioner pada bagian keuangan kami.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi

Ka. Sub. Bag. Keuangan

BADAN ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NIP. 19801226 198003 2 001

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Badan Lingkuan Hidup**

Alamat : Jl. Lunjuk Jaya No. 02 (Demang Lebar Daun) Palembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Fitri Andriani**

NIM : 22 2011 345

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Program Studi : Akuntansi

Disetujui untuk melakukan riset dengan membagikan kuesioner pada bagian keuangan kami.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Badan Lingkuan Hidup

(Kms. H. Panji, SE)

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 03 (Bukit Besar) Palembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Fitri Andriani**

NIM : 22 2011 345

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Program Studi : Akuntansi

Disetujui untuk melakukan riset dengan membagikan kuesioner pada bagian keuangan kami.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

An. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kasubag. Keuangan

BPMK

Hayanawaty Anggraini, SE. MM

Nip. 19770808 199603 2001

**DAFTAR PERNYATAAN (KUESIONER)**

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

Pegawai Pemerintahan Kota Palembang Bagian Keuangan

di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai kesiapan dan pemahaman pemerintah daerah Kota Palembang dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/ibu/Sdr/Sdri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,

Fitri Andriani

## Petunjuk Pengisian

Nama :

Alamat :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Berilah tanda *Check List* (√) pada jawaban yang sesuai.

Keterangan:

a. Ya

b. Tidak

**A. Variabel Pemahaman**

| | Variabel Pemahaman | Alternatif Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Saya memiliki pengetahuan yang memadai tentang tujuan SAP berbasis akrual. | | |
| 2 | Saya paham aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, daan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP 2010. | | |
| 3 | SAP 2010 memerlukan kerumitan teknik penyusunan. | | |

**B. Variabel Kesiapan**

**I. Indikator Komitmen/Integritas**

| | Indikator Komitmen/Integritas | Alternatif Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Anda memiliki kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjunjung azas, visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual. | | |
| 2 | Anda memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan system akuntansi pemerintahan. | | |
| 3 | Pemerintah mempunyai sikap komitmen dan integritas pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. | | |
| 4 | Pemerintah mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugaspemerintahan daerah. | | |
| 5 | Pemerintah mempunyai strategi pendekatan yang humanis transparan, demokratis, dan akuntable dalam pembangunan SAP dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. | | |

## II. Indikator Kesiapan SDM

| | Indikator Kesiapan SDM | Alternatif Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Pemerintah memiliki integritas dalam pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. | | |
| 2 | Anda membutuhkan perhatian dan penghargaan (*Reward and punishment*) untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal dibidang keuangan dengan menggunakan SAP. | | |
| 3 | Pemerintah membutuhkan dukungan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal dibidang keuangan dengan menggunakan SAP. | | |
| 4 | Pemerintah memiliki/membutuhkan adanya dorongan dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dengan menggunakan SAP dibidang keuangan. | | |
| 5 | Pemerintah membutuhkan ruangan kerja, dan lingkungan nyaman baik khususnya untuk mampu meningkatkan optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan SAP dibidang keuangan. | | |
| 6 | Anda membutuhkan promosi atasan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. | | |
| 7 | Anda memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan SAP sebagai sarana mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan daerah. | | |

**III. Indikator Kesiapan Sarana dan Prasarana**

| | Indikator Sarana Prasarana | Alternatif Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk operasi SAP. | | |
| 2 | Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi yg berkesinambungan khususnya untuk operasi SAP. | | |
| 3 | Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana administrasi yang memadai khususnya untuk operasi SAP. | | |
| 4 | Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi SAP. | | |
| 5 | Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sumber daya manusia berkualitas yang memadai khususnya untuk operasi SAP. | | |

**IV. Indikator Kesiapan Sistem Informasi**

| | Indikator Sistem Informasi | Alternatif Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Pemerintah didukung oleh system Manajemen Informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten. | | |
| 2 | Pemerintah didukung oleh system dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali. | | |
| 3 | Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana system perangkat lunak SAP. | | |
| 4 | Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan system perangkat lunak SAP | | |

بسم الله الرحمن الرحيم

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMA MAHASISWA | : **FITRI ANDRIANI** | PEMBIMBING | |
| M | : **22 2011 345** | KETUA | : **Betri, S.E., Ak., M.Si, CA** |
| ROGRAM STUDI | : **Akuntansi** | ANGGOTA | : |
| IDUL SKRIPSI | : **Pemahaman dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)** | | |

| O. | TGL/BL/TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | KETUA | ANGGOTA | |
| 1 | 1/3 | Bab | | | Acc |
| 2 | | | | | |
| 3 | 15/4 | Bab 1/5 3 | | | Perbaiki |
| 4 | | | | | |
| 5 | 15/5 | Bab 1/5 3 | | | Acc |
| 6 | 7/6 | Bab 4 | | | Perbaiki |
| 7 | | | | | |
| 8 | 18/6 | Bab 4. | | | Perbaiki |
| 9 | | | | | |
| 10 | 19/6 | Bab 4 | | | Perbaiki |
| 11 | | | | | |
| 12 | 19/7 | Bab 1 5/15 | | | Perbaiki |
| 13 | | | | | |
| 14 | 24/7 | Bab 1 5/15 | | | Acc |
| 15 | | | | | |
| 16 | 25/7 | Abstrak | | | Acc |

**ATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

**Dikeluarkan di : Palembang**

**Pada tanggal : / /**

**a.n. Dekan**

Program Studi

**Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si**

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUSI PERGURUAN TINGGI | Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | (B) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) | Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | (B) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) | Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 | (B) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 | (B) |

fe.umpalembang.ac.id Email : febumplg@umpalembang.ac.id

lamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018


بسم الله الرحمن الرحيم

## LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| Hari / Tanggal | : Senin, 10 Agustus 2015 |
| Waktu | : 13.00 s/d 17.00 WIB |
| Nama | : Fitri Andriani |
| NIM | : 22 2011 345 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Mata Kuliah Pokok | : Akuntansi Sektor Publik |
| Judul Skripsi | : PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang) |

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

| NO | NAMA DOSEN | JABATAN | TGL PERSETUJUAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betri, S.E, M.Si., Ak., CA | Pembimbing | 14/8/2015 | |
| 2 | Drs. Sunardi, S.E, M.Si | Ketua Penguji | 14/8/2015 | |
| 3 | Betri, S.E, M.Si., Ak., CA | Penguji I | 14/8/2015 | |
| 4 | Khusosi, SE | Penguji II | 14/8/2015 | |

Palembang, Agustus 2015
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

**Rosalina Ghozali,SE,Ak.M.Si**
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

## TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

| | | |
|---|---|---|
| Name | : | Fitri Andriani |
| Place/Date of Birth | : | Palembang, June 27th, 1991 |
| Test Times Taken | : | +1 |
| Test Date | : | February 17th, 2015 |

*Scaled Score*

| | | |
|---|---|---|
| Listening Comprehension | : | 52 |
| Structure Grammar | : | 40 |
| Reading Comprehension | : | 48 |
| OVERALL SCORE | : | 470 |

Palembang, March 5th, 2015
Head of Language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM?NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

## PIAGAM

No. 259/H-4/LPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : FITRI ANDRIANI |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 222011345 |
| Fakultas | : Ekonomi |
| Tempat Tgl. Lahir | : PALEMBANG, 27-07-1991 |

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 02 September 2014 bertempat di:

| | |
|---|---|
| Kelurahan/Desa | : BIYUKU |
| Kecamatan | : Suak Tapeh |
| Kota/Kabupaten | : Banyuasin |
| Dinyatakan | : LULUS |

Palembang, 15 September 2014

Mengetahui

Rektor

Ketua LPKKN-UMP

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ir. Alfahannasir, M.Si.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

259/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بسم الله الرحمن الرحيم

DIBERIKAN KEPADA :

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | FITRI ANDRIANI |
| NIM | : | 222011345 |
| PROGRAM STUDI | : | Akuntansi |

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (24) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 03 Juli 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

**Drs. Antoni, M.H.I.**

## BIODATA PENULIS

| | |
|---|---|
| Nama | : Fitri Andriani |
| NIM | : 22 2011 345 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Palembang, 27 Juni 1991 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Jl. Swadaya Lr. Prikanan III No. 303 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Sekip Ujung Palembang |
| Telepon | : 08569357308/ 081367480901 |
| Nama Orang Tua : | |
| - Ayah | : A. Rani |
| - Ibu | : Aisyah |
| Pekerjaan : Orang Tua : | |
| - Ayah | : Petani |
| - Ibu | : Wirausaha |

Penulis

**Fitri Andriani**